

**ANALISIS DAMPAK AGLOMERASI INDUSTRI
DAN *HUMAN CAPITAL INVESTMENT*
TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL
PULAU SUMATERA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(PERIODE 2018 – 2022)**

Skripsi

**ANGGUN ZASKYA AMANDA
NPM : 2051010216**



**Program Studi Ekonomi Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/2024 M**

**ANALISIS DAMPAK AGLOMERASI INDUSTRI
DAN *HUMAN CAPITAL INVESTMENT*
TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL
PULAU SUMATERA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(PERIODE 2018 – 2022)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

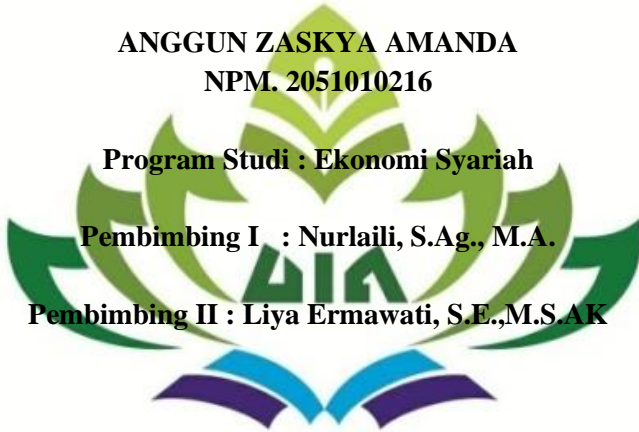
Oleh :

**ANGGUN ZASKYA AMANDA
NPM. 2051010216**

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Nurlaili, S.Ag., M.A.

Pembimbing II : Liya Ermawati, S.E.,M.S.AK



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/2024 M**

ABSTRAK

Ketimpangan wilayah ini muncul sebagai akibat dari adanya pendapatan dan tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan ekonomi disuatu wilayah terutama pada aspek penunjang pembangunan yakni wilayah sebaran aglomerasi dan *human capital investment* yang berbeda pada setiap daerah sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antara lain diukur dengan Indeks Williamson. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aglomerasi industri dan *human capital investment* terhadap ketimpangan regional pulau Sumatera ditinjau dari perspektif ekonomi islam periode (2018 – 2022).

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan berupa data sekunder dalam bentuk data panel dengan menggabungkan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* pada penelitian ini menggunakan 5 tahun terakhir yakni 2018 – 2022, sedangkan *cross section* pada penelitian ini menggunakan 10 Provinsi yang ada di pulau Sumatera. Data diolah dengan analisis data panel dan dengan regresi *Random Effect Model* menggunakan aplikasi *Eviews 9*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Aglomerasi Industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatera tahun 2018 – 2022. *Human Capital Investment* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatera. Sedangkan secara simultan, Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional. Dalam perekonomian islam melarang adanya ketimpangan pembangunan yakni kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar keseluruh masyarakat dan hasil – hasil produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.

Kata Kunci : Ketimpangan Regional, Aglomerasi Industri, dan *Human Capital Investment*

ABSTRACT

This regional inequality arises as a result of income and is not balanced by equal distribution of economic development in a region, especially in aspects supporting development, namely the distribution of agglomeration areas and human capital investment which is different in each region, resulting in development inequality between regions. Development inequality is measured, among other things, by the Williamson Index. This research aims to determine the influence of industrial agglomeration and human capital investment on regional inequality on the island of Sumatra from an Islamic economic perspective for the period (2018 - 2022).

This type of research is quantitative research, the data used is secondary data in the form of panel data by combining time series and cross section data. The time series data in this research uses the last 5 years, namely 2018 – 2022, while the cross section in this research uses 10 provinces on the island of Sumatra. The data was processed by panel data analysis and by Random Effect Model regression using the Eviews 9 application.

The results of this research show that the Industrial Agglomeration variable has a negative and significant effect on regional inequality on the island of Sumatra in 2018 – 2022. Human Capital Investment has a positive and not significant effect on regional inequality on the island of Sumatra. Meanwhile, simultaneously, Industrial Agglomeration and Human Capital Investment have a positive and significant effect on regional inequality. Islamic economics prohibits inequality in development, namely that wealth cannot be concentrated in just a group of people, but must be spread throughout society and production results originating from national wealth must be shared fairly.

Keywords : Regional Inequality, Industrial Agglomeration, and Human Capital Investment



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmi, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggun Zaskya Amanda
NPM : 2051010216
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS DAMPAK AGLOMERASI INDUSTRI DAN *HUMAN CAPITAL INVESTMENT* TERHADAP KETIMPANGAN REGIONAL PULAU SUMATERA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (PERIODE 2018 – 2022)" adalah benar – benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telak dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024



Anggun Zaskya Amanda
NPM. 2051010216



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmi, Sukarame, Bandar Lampung Telp 0721703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022)

Nama : Anggun Zaskya Amanda
NPM : 2051010216
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Nurlaili, S.Ag., M.A
NIP. 197710152005012003

Pembimbing II

Liya Ermawati, S.E., M.S.AK
NIP. 198903072019032020

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeani, M.E.Sy
NIP.198208092011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmi, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022)” disusun oleh Anggun Zaskya Amanda, NPM : 2051010216, Program Studi : **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Jum’at/ 28 Juni 2024.

Tim Penguji

Ketua : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E., Sy (.....)

Sekretaris : Yeni Susanti, S.Pd., M.A (.....)

Penguji I : Citra Etika, S.E., M.S.i (.....)

Penguji II : Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

NIP.177009262008011008

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak – anak yatim, orang – orang miskin, dan untuk orang – orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang – orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.

(Q.S. Al – Hasyr [59] : 7)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Siti Rofi'ah, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan disetiap waktuku menuntut ilmu. Senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik didunia maupun diakhirat.
2. Yang tercinta adikku Rafinca Nanda Safitri, dan seluruh keluarga sanak saudaraku yang turut membantu dalam mendoakan serta selalu memberi semangat dan dukungannya sehingga terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Anggun Zaskya Amanda, lahir di Labuhan Maringgai, 16 Juli 2001 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Zainal Abidin dan Ibu Siti Rofi'ah. Pendidikan formal penulis dimulai dari :

1. TK PGRI Tebing, Lampung Timur Tahun 2006 – 2007
2. SDN I Tebing, Lampung Timur Tahun 2007 – 2013
3. Pondok Pesantren Modern Madinah, Lampung Timur Tahun 2013 – 2020
4. UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2020 – 2024.

Adapun pengalaman organisasi yang pernah penulis ikuti adalah sebagai berikut :

1. Bendahara Pusat dalam Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Madinah, 2018 – 2020
2. Staf Kemuslimahan UKM RIIEF, 2022
3. Staf bidang KIMA LDF IKRIMAH, 2022
4. Kepala Bidang Keputrian LDF IKRIMAH, 2023.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analisis Dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan Program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT memberikan pahala, kesehatan dan keberkahan serta balasan yang setimpal atas amal kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada :

1. Bapak Prof. Tulus Suryanto, S.E., M.M., C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi.
3. Ibu Nurlaili S.Ag., M.A dan Ibu Liya Ermawati, S.E., M.S.AK selaku Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

membimbing penulis hingga dapat terselesaikannya penyusunan Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya.
5. Keluargaku tersayang bapak, ibu, adikku serta saudara penulis yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan secara moril maupun materil kepada penulis.
6. Sahabat – sahabat yang ada diperguruan maupun di rumah, yang selalu terlibat dalam segala proses kehidupan hingga penulis sampai dititik ini.
7. Teman – teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2020, terutama Yunita Oktaviani dan Yonatia Lasya Nurcahani, yang selalu menemani dan terlibat dalam proses perkuliahan, semoga kita semua dimudahkan dalam segala urusan.
8. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang nantinya dapat memberikan masukan bagi penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak, terima kasih.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024
Penulis

Anggun Zaskya Amanda
NPM. 2051010216

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	17
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ekonomi Pembangunan.....	27
B. Ketimpangan Antar Wilayah.....	29
1. Pengertian Ketimpangan Antar Wilayah.....	29
2. Ukuran Ketimpangan Antar Wilayah.....	37

3. Penyebab Umum Terjadinya Ketimpangan	39
4. Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	43
5. Ketimpangan Antar Wilayah dalam Perspektif Islam.....	48
C. Aglomerasi Industri	51
1. Pengertian Industri	51
2. Pengertian Aglomerasi	52
3. Teori Aglomerasi	54
4. Keuntungan Aglomerasi.....	56
5. Menghitung Aglomerasi Industri	58
6. Hubungan Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	59
7. Aglomerasi dalam Ekonomi Islam.....	60
D. <i>Human Capital Investment</i>	61
1. Pengertian <i>Human Capital Investment</i>	61
2. Kriteria <i>Human Capital Investment</i>	72
3. <i>Human Capital Investment</i> sebagai aset yang terlihat	77
4. Keuntungan <i>Human Capital Investment</i>	78
5. Hubungan <i>Human Capital</i> dengan Pertumbuhan.....	78
6. Hubungan <i>Human Capital</i> dengan Ketimpangan	79
E. Kerangka Konseptual.....	79
F. Hipotesis	81
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	85
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	85
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data.....	86
D. Definisi Operasional Variabel	88
E. Instrumen Penelitian	91
F. Metode dan Alat Analisis	91

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	101
B. Gambaran Hasil Penelitian	101
1. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah.....	102
2. Aglomerasi Industri.....	103
3. <i>Human Capital Investment</i>	104
C. Hasil Uji Analisis Data	105
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Hasil Uji

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Industri Pengolahan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022.....	10
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022.....	13
Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen Indeks Pembangunan Manusia	71
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	88
Tabel 4.1 Indeks Williamson Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022.....	102
Tabel 4.2 Indeks Balassa Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022.....	103
Tabel 4.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022.....	105
Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif Data Panel.....	106
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	108
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	108
Tabel 4.7 Hasil Uji Lagrange Multiplier	109
Tabel 4.8 Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	110
Tabel 4.9 Hasil Uji t Statistik	112
Tabel 4.10 Hasil Uji f Statistik.....	113
Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi (R^2)	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson di Pulau Sumatera Tahun 2018 - 2022	7
Gambar 1.2 Jumlah Industri Pengolahan di Pulau Sumatera Tahun 2018 - 2022.....	11
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mengetahui lebih detail tentang skripsi ini dan mendapat gambaran yang jelas serta memudahkan untuk memahami, dan menghindari kesalahpahaman dalam mengembangkan skripsi ini, maka perlu dipertegas judul yang saya ambil adalah “**Analisis Dampak Aglomerasi Industri Dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022)**”. Detail yang dimaksud dari beberapa istilah tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹

2. Dampak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.²

3. Aglomerasi

Aglomerasi adalah pemusatan industri – industri di suatu wilayah, dan akan mempengaruhi daerah – daerah yang lambat perkembangannya.³

4. Industri

¹ Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hedriani, Melia Famiola, *Green Economy* (Ekonomi Hijau) (Bandung : Rekayasa Sains, 2014) 64.

² Nurul Mahmudah, Viviana & Muhammad Syakir A. “Menakar Dampak Perempuan Bekerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga”. Institut Agama Islam Negeri Metro, SETARA (Jurnal Studi Gender dan Anak), Vol. 4, No.2, 2022.

³ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan : Edisi Ke V*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010) : 444.

Industri adalah seluruh dari kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk juga jasa industri.⁴

5. *Human Capital Investment*

Human Capital Investment adalah pengaruh pendidikan formal terhadap pertumbuhan ekonomi, maksudnya adalah semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh seseorang maka akan meningkatkan produktifitas kerja orang tersebut.⁵

6. **Ketimpangan**

Ketimpangan adalah tidak seimbang, berat sebelah, atau kesenjangan, yang mana merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal.⁶

7. **Perspektif**

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁷

8. **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan syari'at islam yang bersumber dari Al- Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸

⁴ Sandi, I Made. Republik Indonesia Geografi Regional. Jakarta : Puri Margasari. 2010.

⁵ Eko Pambudi. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)". Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013.

⁶ Syafrizal. "Ekonomi Wilayah dan Perkotaan" Edisi Kedua, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) : 110.

⁷ Mustofa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 2007) : 15.

⁸ Abdul Mannan. Hukum Ekonomi syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) : 29.

Berdasarkan uraian istilah – istilah pada penegasan judul diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang di maksud dengan judul ini adalah suatu penelitian untuk menganalisis dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022).

B. Latar Belakang Masalah

Saat ini, Indonesia terdiri dari banyak pulau. Salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia adalah pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas ketiga di Indonesia dengan populasi penduduk terbesar kedua setelah Jawa yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup rendah dibandingkan dengan beberapa pulau terbesar lainnya. Terdapat 10 wilayah administrasi yang membentuk pulau Sumatera yakni Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Salah satu permasalahan dalam perekonomian suatu negara yang sulit untuk diatasi yaitu ketimpangan pembangunan wilayah.⁹

Isu – isu strategis yang selama ini dibicarakan adalah ketimpangan pembangunan wilayah. Sama hal nya terjadi di provinsi – provinsi pulau Sumatera. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, baik dalam bentuk regulasi ataupun dalam bentuk anggaran untuk mempersempit ketimpangan. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum mampu secara maksimal untuk mengurangi konflik ketimpangan antar wilayah secara signifikan.¹⁰

Munculnya ketimpangan dalam pembangunan wilayah adalah fenomena yang harus disikapi oleh setiap wilayah mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kepulauan

⁹ Muhammad Ridho, Zulgani & Erni A., Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Sumatera, e – Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah vol.11, No. 1, Januari – April 2022.

¹⁰ Ibid. 2.

bahkan global.¹¹ Ketidakmerataan menyebabkan terhambatnya efektivitas pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan.

Potensi yang dimiliki setiap wilayah berbeda – beda sehingga menyebabkan kemampuan masing – masing wilayah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berbeda – beda. Hal ini turut menyebabkan terjadinya disparitas antar wilayah yang diamati karena adanya perbedaan potensi yang terdapat di setiap wilayah sehingga mengakibatkan kemampuan masing – masing wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga berbeda, Pembangunan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan konsentrasi kegiatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia antar wilayah. Wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi akan cenderung bertumbuh lebih cepat dan kualitas sumber daya manusia (IPM) yang baik merupakan modal dasar pembangunan wilayah yang mampu mendorong produktivitas kerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹²

Ketimpangan wilayah ini muncul salah satunya sebagai akibat dari adanya pendapatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan ekonomi di suatu wilayah sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Maka dari itu, tidak heran apabila terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. upaya untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing di berbagai sektor dalam rangka mengurangi ketimpangan

¹¹ Maryati Ari, Dyah Setyorini G, and suharno. “*Inequality Between The Region In The Province of Central Java 2012 – 2016*”. *International Conference on Rural Development an Entrepreneurship 2019 : Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0*”. vol.5 No.1. 2019.

¹² Ingil Intan H, Vecky A. J & Mauna Th. Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 01, Juli 2021.

regional yakni dengan cara pembangunan yang merata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Islam juga membahas mengenai situasi perekonomian yang dibentuk oleh nilai – nilai dan prinsip islam, yakni perekonomian harus menciptakan keadilan dan keharmonisan.¹⁴ Keadaan ini bisa dicerminkan dengan adanya kesempatan pada setiap individu untuk mendapatkan hak – hak nya secara penuh dan proposional serta adanya iklim yang sinergis antar anggota masyarakat untuk saling mendukung (harmonis) agar terciptanya kesejahteraan. Keadilan ekonomi pada prinsipnya ialah tidak boleh hanya terkonsentrasi dan beredar pada sekelompok saja, sebagaimana dikemukakan dalam Al – Qur’an :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak – anak yatim, orang – orang miskin, dan untuk orang – orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang – orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya”.
(Q.S. Al – Hasyr [59] : 7)

Berdasarkan ayat tersebut, Menurut Quraish Shihab adalah menegaskan bahwa sebaiknya harta benda jangan

¹³ Putra, E. D., Christina, M., & Pratiwi, Y. *Identification of Leading Sector and Cluster Analysis of Regencies in Kalimantan*. 8(2), (2019) : 224–243

¹⁴ Ibid. 73.

hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia atau kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli. Karena islam menetapkan bahwa harta itu memiliki fungsi sosial.¹⁵

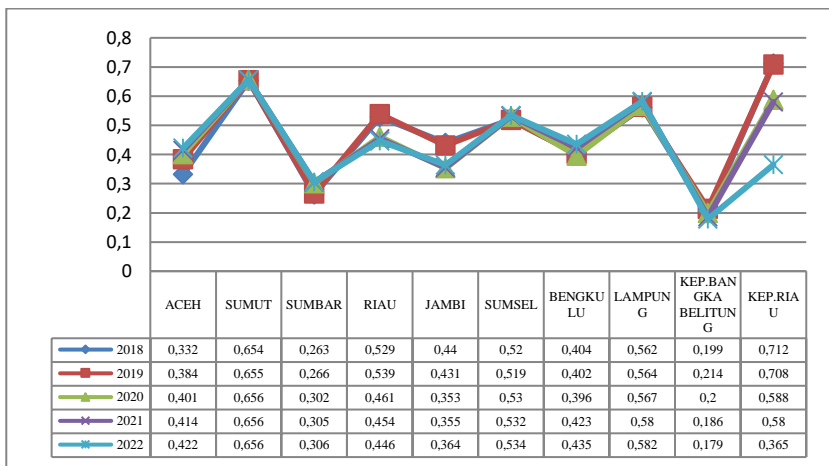
Ketimpangan di pulau Sumatera belum terpecahkan, dalam ketimpangan ini tidak hanya terjadi di pulau Sumatera bagian barat, utara dan selatan, namun juga antar kabupaten di berbagai provinsi. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesenjangan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah lama dipandang sebagai tanda keberhasilan proses pembangunan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat sangat penting bagi kemajuan ekonomi secara keseluruhan, maka permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pembangunan dapat teratasi.

Dalam hal ini pada masing – masing provinsi di pulau Sumatera tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antarwilayah. Setiap wilayah telah melaksanakan kebijakan otonomi daerah masing – masing yang bertujuan untuk mempercepat kemajuan wilayah. Namun, hasil dari otonomi daerah tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan karena ada beberapa daerah yang tidak mampu untuk mengelola sumber dayanya dengan optimal. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin tidak merata serta mengakibatkan peningkatan ketimpangan pembangunan.¹⁶ Indikasi dari adanya ketimpangan wilayah di pulau Sumatera adalah Indeks Williamson yang masih tinggi.

¹⁵ Shihab, Quraish, *Tafsir al – Mishbah* : Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an, vol.14, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

¹⁶ Soeharjoto, “*Factors That Affect Inequality Diatribution Income In Central Jawa*”. *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research*. Vol. 3 Issue. 4. 2019.

Indeks williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rata – rata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi disuatu daerah menunjukkan ketimpangan pembangunan yang tinggi antarwilayah tersebut.¹⁷ Dalam hal ini bisa kita lihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Sumber : Data BPS (diolah 2024)

Gambar 1.1
Pekembangan Indeks Williamson di Pulau Sumatera
Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Berdasarkan pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah pada masing – masing Provinsi di pulau Sumatera cenderung berbeda – beda dan dalam kategori ketimpangan yang cukup tinggi karena nilai williamson nya mendekati satu. Adapun Provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan yang cukup tinggi pada tahun 2022 yakni provinsi Sumatera Utara dengan Indeks williamson sebesar 0,656 kemudian terjadi pada provinsi Lampung dengan Indeks williamson sebesar 0,582. Namun demikian, ketimpangan

¹⁷ Sjafrijal, Ekonomi regional teori dan aplikasi. Sumatera Barat : Baduose Media. 2008.

pada masing – masing provinsi selama tahun 2018 – 2022 terus menurun dari tahun ke tahun.

Pada konsep pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kohesi sosial diantara masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin dalam hal standar hidup.

Peranan sektor industri pengolahan menjadi primadona perekonomian indonesia. Sejak tahun 1991 sektor industri telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor industri dari tahun ketahun selalu positif dan meningkat. Hal ini mendorong peranan sektor industri pengolahan menjadi peringkat pertama dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB). Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian akan memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan wilayah tersebut yang terus dapat dikembangkan dan dapat menjadi pendorong roda perekonomian agar semakin stabil (Stanny, 2009).¹⁸

Sektor industri diarahkan agar mampu menjadi penggerak dan pemimpin (*the leading sektor*) terhadap perkembangan sektor perekonomian lainnya, serta akan mendorong perkembangan industri yang terkait dengannya. (Bungaran Seragih, 2010).¹⁹

Pada kawasan sektor industri dipulau Sumatera ini cenderung beraglomerasi, yang artinya terjadi pemusatan berbagai industri ke dalam suatu tempat tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada tempat tersebut, dan mempengaruhi ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah. Menurut Marshall, federasi

¹⁸ Stanny, D. Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat (Analisis Input Output). Institut Pertanian Bogor (2009).

¹⁹ Bungaran Saragih. Agribisnis Paradigma Baru Para Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (3rd ed ; R.Pambudy, Ed.) Bogor : PT. Penerbit IPB Press.

muncul ketika suatu industri memiliki lokasi produksi yang memungkinkan beroperasi dalam jangka panjang, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang signifikan dengan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut.²⁰

Timbulnya aglomerasi di beberapa wilayah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana potensi dan kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka mendapatkan manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan.

Pemusatan kegiatan ekonomi atau aglomerasi industri ini akan memberikan dampak kepada wilayah dimana aktivitas perekonomian itu berlangsung, maupun kepada wilayah-wilayah sekitar yang terkena imbasnya. Pengaruh atau dampak tersebut terjadi secara langsung dan tidak langsung serta dapat berupa dampak positif membawa keuntungan-keuntungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Keuntungan aglomerasi industri berupa produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil. Keuntungan berupa produktivitas dan pendapatan pada industri yang lebih tinggi terjadi karena perusahaan akan menambah produksi dengan cara memperbesar perusahaan dan meningkatkan skala pabrik sehingga produksi perunit dapat di minimalisir.²¹

Selain itu aglomerasi memiliki keuntungan menurunkan biaya transportasi, hal ini terjadi dikarenakan terkonsentrasinya industri pada suatu daerah akan mendorong berdirinya perusahaan jasa angkut dengan segala fasilitasnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan dapat meningkatkan pemasukan PDRB, oleh karena itu aglomerasi industri akan membawa pengaruh positif terhadap

²⁰ Syafrizal. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Boduose Media. Padang, Sumatera Barat. 2008.

²¹ Matitaputty, Shandy Jennifer. *Analisis Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Dengan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1994 – 2007*. (2010).

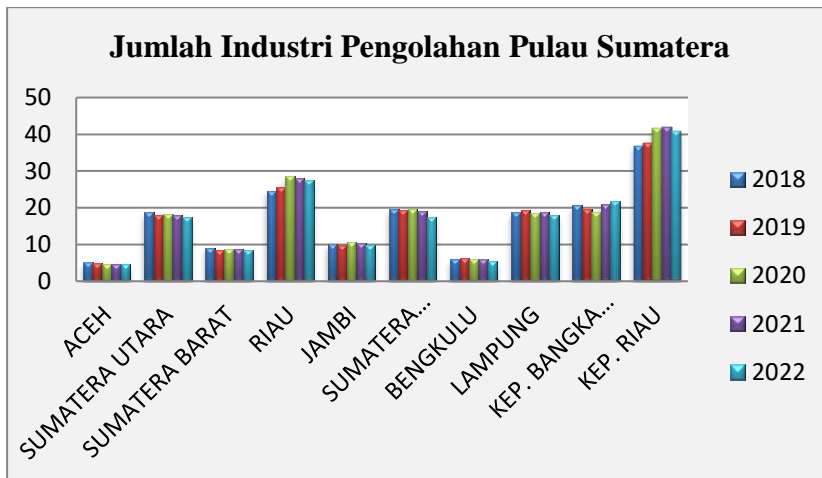
pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Adapun dampak negatif yang menimbulkan biaya atau kerugian sosial juga berupa ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu Aglomerasi industri dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional yang terjadi.²² Maka pemerintah upayakan pada beberapa kawasan sebaran wilayah industri di Pulau Sumatera. Dalam hal ini bisa kita lihat pada salah satu aktivitas industri pengolahan yang terjadi pada provinsi – provinsi di Pulau Sumatera. Pada tabel 1.1 dibawah :

Tabel 1.1
Jumlah Industri Pengolahan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022 (Persen)

PROVINSI	2018	2019	2020	2021	2022
ACEH	5.1	4.8	4.6	4.6	4.6
SUMATERA UTARA	18.76	18.05	18.09	17.88	17.41
SUMATERA BARAT	9.10	8.38	8.64	8.79	8.54
RIAU	24.61	25.55	28.49	28.06	27.36
JAMBI	9.94	9.81	10.73	10.24	9.77
SUMATERA SELATAN	19.51	19.37	19.73	19.08	17.50
BENGKULU	5.96	6.07	5.98	5.82	5.49
LAMPUNG	18.62	19.14	18.45	18.77	18.08
KEP. BANGKA BELITUNG	20.60	19.59	18.76	20.86	21.84
KEP. RIAU	36.85	37.57	41.63	42.03	40.81

Sumber : Data BPS (diolah 2024)

²² Agnesa Marytha C. Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020. Diponegoro *Journal Of Economics*, Vol. 11, No. 1 (2022).



Sumber : Data BPS (diolah 2024)

Gambar 1.2
Jumlah Industri Pengolahan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Berdasarkan pada tabel 1.1 dan gambar 1.2 menunjukkan ternyata tidak sama untuk semua wilayah. Provinsi – provinsi tertentu memiliki peran industri yang relatif lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, bisa kita lihat pada tahun 2022 industri pengolahan tertinggi terdapat pada provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 40.81%, sedangkan industri pengolahan terendah terjadi pada provinsi Aceh yakni sebesar 4.6 %. hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri pengolahan di pulau Sumatera secara umum cukup beragam, terbukti hingga saat ini belum banyak mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh persebaran industri di pulau Sumatera yang merupakan salah satu sektor penunjang terbesar pembentukan Produk Domestik Regional Bruto masih terpusat pada beberapa wilayah tertentu saja, sedangkan pada beberapa wilayah lainnya masih sangat rendah bahkan hampir tidak ada sama sekali.

Disisi lain sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama adalah aset yang paling cepat dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir adanya ketimpangan, karena merupakan faktor produksi utama yang mengoptimalkan faktor produksi lainnya. Pengoptimalisasian faktor – faktor produksi kemudian akan meningkatkan output dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro. *Human capital investment* merupakan salah satu indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mana menjadi modal fisik dalam perekonomian untuk lebih produktif. Menurut Meire & Stiglitz agen – agen pembangunan bisa lebih produktif jika memiliki pengetahuan, kesehatan, dan nutrisi yang lebih baik, sehingga peningkatan keterampilan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.²³ Meskipun *Human Capital Investment* (HCI) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, namun pada penelitian ini *human capital investment* dilihat hubungannya dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Perbedaan kondisi demografis atau sumber daya manusia disuatu daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang mengukur mengenai taraf hidup masyarakat. IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian, karena pembangunan sumber daya manusia yang baik dapat memaksimalkan faktor – faktor produksi yang ada dalam suatu daerah.²⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Tambunan dalam islami (2018) tinggi rendahnya IPM akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Namun permasalahannya adalah IPM

²³ Kuncoro, Mudrajad. Masalah Kebijakan dan Politik EKONOMIKA PEMBANGUNAN. (Jakarta : Erlangga, 2010) : 9.

²⁴ Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.

disetiap daerah berbeda – beda, sehingga menjadikan IPM sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM yang tidak merata akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah. Hal ini akan mendorong ketidakseimbangan pada pembangunan. Apabila terus dibiarkan maka ketimpangan yang terjadi akan semakin melebar.²⁵ Dalam hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Persen)					Rata – Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
ACEH	71.19	71.90	71.99	72.18	72.80	72.01
SUMATERA UTARA	71.18	71.74	71.77	72.00	72.71	71.88
SUMATERA BARAT	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26	72.48
RIAU	72.44	73.00	72.71	72.94	73.52	72.92
JAMBI	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14	71.39
SUMATERA SELATAN	69.39	70.02	70.01	70.24	70.90	70.11
BENGGULU	70.64	71.21	71.40	71.64	72.16	71.41
LAMPUNG	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45	69.72
KEP. BANGKA BELITUNG	70.67	71.30	71.47	71.69	72.24	71.47
KEP. RIAU	74.84	75.48	75.59	75.79	76.46	75.63

Sumber : Data BPS (diolah 2024)

²⁵ Islami, Fitrah Sari, & Nugroho SBM. “Faktor – Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur Indonesia”. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen. Vol.33 No.1. 2018.

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pemerataan IPM di pulau Sumatera terdapat perbedaan antar Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun 2018 – 2022 yakni terdapat pada provinsi Kepulauan Riau dengan rata – rata IPM sebesar 75,63 sedangkan rata – rata IPM terendah terjadi pada Provinsi Lampung yakni hanya mencapai sebesar 69.72, dengan adanya perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu untuk mengukur ketimpangan pembangunan wilayah.

Sejalan dengan latar belakang diatas, permasalahan ketimpangan pembangunan wilayah menjadi permasalahan yang sering terjadi antar wilayah, maka dari itu perlu dibuktikan dalam sebuah penelitian, berdasarkan dari penelitian sebelumnya menurut penelitian Vincent (2022)²⁶ menyatakan bahwa tidak ada terjadinya aglomerasi industri di 5 provinsi yang ada di Sumatera bagian selatan, namun dari data yang peneliti temukan pada 5 provinsi tersebut terdapat sejumlah industri pengolahan pada masing – masing provinsi, sehingga hal ini menarik perhatian peneliti untuk membahas lebih lanjut mengenai potensi adanya pengaruh aglomerasi industri yang mana terjadi pemusatan kegiatan industri – industri disuatu wilayah dan *human capital investment* yang merupakan modal manusia dilihat dari angka IPM ikut menjadi pendorong dalam melakukan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan akan memicu pertumbuhan ekonomi wilayah industri dan memberikan efek positif bagi wilayah lain sekitarnya sehingga mengurangi ketimpangan regional dan meningkatkan pemerataan antar wilayah khususnya pada wilayah pulau Sumatera yang mana ternyata penggunaan pada objek pulau Sumatera dan beberapa rentan waktu 5 tahun terakhir belum ada sebelumnya. Maka dari itu dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada provinsi – provinsi di pulau Sumatera

²⁶ Vincent Wijaya. Dampak Tingkat Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Daerah Sumatera Bagian Selatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya 2022).

dengan judul: “Analisis Dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi latar belakang di atas Analisis Dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022), terdapat permasalahan yang mana aktivitas industri pengolahan dan *human capital investment* di pulau Sumatera ternyata tidak sama untuk semua wilayah. Provinsi – provinsi tertentu memiliki peran industri dan sumber daya manusia (SDM) yang relatif lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri pengolahan dan sumber daya manusia (SDM) di pulau Sumatera secara umum cukup bervariasi. Aglomerasi industri dan *human capital investment* yang terjadi di berbagai wilayah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional yang terjadi sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut seberapa besar dampak aglomerasi industri dan *human capital investment* terhadap ketimpangan regional pada masing – masing provinsi yang ada di pulau Sumatera.

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu membahas masalah tentang Analisis Dampak Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera Di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Periode 2018 – 2022). Data yang digunakan adalah data sekunder dari badan pusat statistik, dengan objek penelitian adalah 10 Provinsi di pulau Sumatera yakni terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung dari Tahun 2018 – 2022 dan

variabel yang di uji yaitu Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah aglomerasi industri berpengaruh terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatera tahun 2018 – 2022 ?
2. Apakah *human capital investment* berpengaruh terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatera tahun 2018 – 2022 ?
3. Apakah aglomerasi industri dan *human capital investment* secara bersama– sama berpengaruh terhadap ketimpangan regional pulau Sumatera tahun 2018 – 2022 ditinjau dari perspektif ekonomi islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian yang akan penulis jelaskan mencakup sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatera tahun 2018 – 2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh *human capital investment* terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatera tahun 2018 – 2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri dan *human capital investment* secara bersama – sama terhadap ketimpangan regional pulau Sumatera tahun 2018 – 2022 ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

- a. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi tentang ketimpangan regional

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi pada khususnya yang berkaitan dengan masalah aglomerasi industri dan *human capital investment* terhadap ketimpangan regional di pulau Sumatra pada tahun 2018 – 2022.

- b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak – pihak tertentu guna menjadikan penelitian ini sebagai acuan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan dengan melihat kondisi pada suatu wilayah sehingga meminimalisir adanya ketimpangan dan meningkatkan pemerataan antar wilayah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu adalah kajian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya sesuai dengan variabel judul yang penulis lakukan. Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu :

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	Alsion Aria Erlangga 2018	Aglomerasi Industri Dan Perekonomian Di Pulau Sumatera Tahun 2001 - 2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi positif masih tergolong lemah, sehingga daerah tersebut bukan merupakan daerah aglomerasi industri. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa aglomerasi positif dan tidak

			signifikan, investasi berpengaruh positif dan signifikan, ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian di Pulau Sumatera. ²⁷
2.	Kartira Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhakti 2018	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera.	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah sumatera cenderung mengalami penurunan, sedangkan ketimpangan pembangunan berkisar antara IW 0,406 – 0,446. Tingkat ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2012 di provinsi lampung dengan angka 0,103. Berdasarkan hasil regresi data panel diketahui bahwa secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, secara simultan investasi, belanja pemerintah, aglomerasi

²⁷ Alsion Aria Erlangga. Aglomerasi Industri Dan Perekonomian Di Pulau Sumatera Tahun 2001 – 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Universitas Lampung, Bandar Lampung 2018).

			dan tenaga kerja berpengaruh juga terhadap ketimpangan pembangunan. ²⁸
3.	Yuli tri arimurty N, Rully N, Wurarah, dan Dedy Riantoro 2020	Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Pengolahan Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Regional di Provinsi Papua Barat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah, dengan adanya aglomerasi industri pengolahan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah. Dapat dikatakan bahwa aglomerasi industri pengolahan mampu menjadi variabel moderasi, sedangkan aglomerasi pertanian belum mampu menjadi variabel moderasi. ²⁹
4.	Uswatun Khasanah 2021	Pengaruh Aglomerasi, Angkatan Kerja, dan <i>Human Capital Investments</i>	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : <i>pertama</i> , aglomerasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

²⁸ Kartira Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhakti. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera, e – jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7, No. 1, Januari – April 2018.

²⁹ Yuli tri arimurty N, Rully N, Wurarah, dan Dedy Riantoro. Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Pengolahan Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Regional di Provinsi Papua Barat. Lensa Ekonomi, Vol 11, No 01, November 2020.

		<p>Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Pada Periode 2014 – 2020)</p>	<p>pertumbuhan ekonomi sebesar t_{hitung} 2,414321 artinya t_{hitung} 2,414321 $>t_{tabel}$ 1,986 sehingga setiap kenaikan 1 % aglomerasi maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan sebesar 50,7870 persen. <i>Kedua</i>, angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. <i>Ketiga, human capital investment</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. <i>Keempat</i>, aglomerasi, angkatan kerja dan <i>human capital investment</i> serta simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁰</p>
5.	Vincent Wijaya 2022	Dampak Tingkat Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan	Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa : a) tidak terjadinya aglomerasi industri di 5

³⁰ Uswatun Khasanah. Pengaruh Aglomerasi, Angkatan Kerja, dan *Human Capital Investments* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Pada Periode 2014 – 2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).

		Ekonomi Wilayah di Daerah Sumatera Bagian Selatan	provinsi yang ada di sumatera bagian selatan, dan b) tingkat aglomerasi industri, tenaga kerja sektor industri dan tingkat upah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 5 provinsi sumatera bagian selatan. ³¹
6.	Mukhlis, Bernadette R, Taufiq M, dan Rosmiyati Chodijah 2017	<i>Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, And Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia.</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi industri pengolahan. 2) aglomerasi industri manufaktur, jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan pendapatan perkapita tahun sebelumnya berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan 3) pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan

³¹ Vincent Wijaya. Dampak Tingkat Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Daerah Sumatera Bagian Selatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya 2022).

			ekonomi tahun sebelumnya dan aglomerasi manufaktur industri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. ³²
7.	Farida Rahmawati dan Refsy Ayu Yuniarti 2020	<i>Analysis Of The Effect Of Industrial Agglomeration, Economic Growth, Human Development Index (HDI), And Open Unemployment Rate On Regional Inequality In East Java Province</i>	Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) variabel aglomerasi industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah baik secara simultan maupun secara persial. 2) variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional. 3) variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, dan 4) variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

³² Mukhlis, Bernadette R, Taufiq M, & Rosmiyati Chodijah. *Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, And Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issue*, vol 7, 2017.

			ketimpangan wilayah. ³³
8.	Farida Rahmawati dan Firtiani Romziatin 2020	<i>Do Industrial Agglomeration and Investment Shrink Regional Inequality ?</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi memberikan peran kunci pada ketimpangan di regional jawa timur. Selain itu, investasi memberikan pengaruh yang negatif pada ketimpangan regional sedangkan pertumbuhan ekonomi secara positif mempengaruhi ketimpangan regional di jawa timur. ³⁴
9.	Siti F, Syarwani c, & Sri Indriyani S 2021	<i>Influence of Industrial Agglomeration, Labor, and Happy Levels on Economic Growth</i>	Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pengaruh aglomerasi industri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi. Artinya, setiap peningkatan industri aglomerasi

³³ Farida Rahmawati dan Refsy Ayu Yuniarti.. *Analysis Of The Effect Of Industrial Agglomeration, Economic Growth, Human Development Index (HDI), And Open Unemployment Rate On Regional Inequality In East Java Province. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and law. Vol 22, Issue 1 (August 2020).*

³⁴ Farida Rahmawati dan Firtiani Romziatin. *Do Industrial Agglomeration and Investment Shrink Regional Inequality* , Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisni, 8 (2) (2020) : 119 – 126.

			sebesar 1 % akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,214029 di sulawesi. 2) pengaruh serapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perekonomian di sulawesi, dan 3) efeknya tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sulawesi. ³⁵
10.	Suhua zhang, Yasmin b, Aslam I, & Judhiana Abdul G 2023	<i>Exploring the Effect of Industrial Agglomeration on Income Inequality In China</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aglomerasi industri dan ketimpangan pendapatan menunjukkan hubungan ‘‘Bentuk U’’ yang terbalik bahwa mereka adalah perubahan non – linier. Ketika tingkat aglomerasi industri meningkat, ketimpangan pendapatan akan meningkat, setelah mencapai nilai tertentu maka ketimpangan

³⁵ Siti F, Syarwani c, & Sri Indriyani S. *Influence od Industrial Agglomeration, Labor, and Happy Levels on Economic Growth, European Journal of Research Development and Sustainabillity (EJRDS)*, vol. 2, No.12, December 2021.

			pendapatan akan menurun. ³⁶
--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang dibagi dalam lima bab terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang pegelasan dari judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori menjelaskan tentang teori Ketimpangan Antar Wilayah, Pengertian Ketimpangan, Ukuran Ketimpangan Antardaerah, Penyebab Umum Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antardaerah, Ketimpangan Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Islam, Teori Aglomerasi Industri, Pengertian Industri, Pengertian Aglomerasi, Teori Aglomerasi, Keuntungan Aglomerasi, Menghitung Aglomerasi Industri, Hubungan Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dalam Ekonomi Islam, Teori *Human Capital Investment*, *Human Capital* sebagai Aset yang Terlihat (*Visible Asset*), Keuntungan dari *Human Capital*, Hubungan *Human Capital Investment* dengan Pertumbuhan Ekonomi, Hubungan *Human Capital Investment* dengan Ketimpangan, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis.

³⁶ Suhua zhang, Yasmin b, Aslam I, & Judhiana Abdul G. *Exploring the Effect of Industrial Agglomeration on Income Inequality In China*, *PloS ONE* 2023. 18(6).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menguraikan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrument penelitian, metode alat analisis yang terdiri dari uji spesifikasi model, dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan memaparkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian analisis tentang deskripsi objek penelitian, gambaran hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang kesimpulan atas hasil pembahasan dari hasil penelitian, pembahasan dan temuan serta rekomendasi yang berisi saran-saran yang praktis dan teoritis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

Grand theory pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bagian dari ilmu yang khususnya mempelajari tentang kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara.

1. Pembangunan Ekonomi

Ekonomi pembangunan adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil mengalami kenaikan dalam jangka panjang jika laju pembangunan lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan perkapita riil meningkat. Pada hakekatnya kajian dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan.³⁷ Pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun yang bersifat lebih analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian pada masyarakat dinegara – negara berkembang dan implikasinya untuk membangun ekonomi dikawasan tersebut. Selanjutnya pembahasan mungkin juga bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dinegara – negara berkembang.³⁸

Menurut Todaro & Smith, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), meningkatkan harga diri masyarakat sebagai manusia (*self – sistem*) dan

³⁷ Agus Eko Sujianto, Pengantar Ilmu Ekonomi : DIKTAT (tulung agung : STAIN,2006) : 29.

³⁸ Santi R. Siahaan. Pengantar Ekonomi Pembangunan. (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2013 : 2 – 3.

meningkatnya kemampuan masyarakat (*freedom from servitude*).³⁹ Dimana, pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan yang lainnya.

Menurut Sadono Sukirno, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang mempelajari tentang tujuan untuk menganalisis masalah – masalah yang dihadapi oleh negara – negara berkembang dan cara mengatasi masalah, agar masalah – masalah tersebut dapat membangun ekonominya untuk berkembang lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi disini ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang mengalami peningkatan. Pendapatan perkapita dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat didaerah tersebut. Masyarakat dapat mengalami kesejahteraan dan pertambahan apabila dalam kurun waktu dari tahun ke tahun pendapatan perkapita riilnya suatu daerah mengalami peningkatan.⁴⁰

Jadi berdasarkan kedua sifat ini dapat disimpulkan, bahwa analisis ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah – masalah yang dihadapi oleh negara – negara berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah – masalah tersebut supaya negara yang bersangkutan dapat membangun ekonominya menjadi lebih cepat lagi.

2. Pembangunan daerah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana terjadinya kerjasama antar pemerintah daerah dan

³⁹ M. P. Todaro dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi di Dunia. Edisi kesembilan, Jilid I. (Jakarta : Erlangga,2003) : 11.

⁴⁰ Sadono Sukirno. Makro Ekonomi Teori Pengantar. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) : 423 – 425.

masyarakatnya serta mengelola sumber daya yang ada. Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama – sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya.⁴¹ Jadi, perbedaan kondisi daerah yang membawa implikasi bagi pola pembangunan yang akan diterapkan. Penyamarataan terhadap pola kebijakan yang berhasil dilakukan pada suatu daerah, belum tentu dapat memberikan manfaat yang sama bagi daerah yang lainnya.

Dengan demikian kebijakan yang diambil dalam pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada pada daerah yang bersangkutan.

B. Ketimpangan Antar Wilayah

1. Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan antar daerah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara berkembang, tetapi pada negara maju walaupun tingkat ketimpangannya berbeda. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah

⁴¹ Candra Fajri Ananda. Pembangunan Ekonomi Daerah : Dinamika dan Strategi Pembangunan. (Malang : UB Press, 2017) : 28.

biasanya terdapat daerah relatif maju dan daerah relatif terbelakang.⁴²

Menurut Syafrizal, ketimpangan wilayah adalah perbedaan distribusi pembangunan ekonomi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi wilayah. Disparitas atau ketimpangan wilayah adalah salah satu masalah yang pasti muncul dengan pembangunan wilayah. Ketidaksetaraan menjadi signifikan ketika wilayah dalam suatu negara terjadi pada berbagai potensi sumber daya alam, lokasi geografis, kualitas sumber daya manusia dan hubungan etnis atau politik. Salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan di wilayah adalah mengatur pembangunan. Tapi pembangunan belum tentu untuk mengurangi ketimpangan daerah. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengedepankan konsep pemerataan pembangunan di Indonesia dengan tujuan mengurangi kesenjangan.⁴³

Terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap proses pembangunan daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan ekonomi antar daerah ini perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ketimpangan ekonomi antar daerah adalah perbedaan antara daerah maju dengan daerah tertinggal yang diukur

⁴² Syafrizal. Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia, Perpustakaan nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ed 1, Cet 1, (Depok : Rajawali Pers, 2018) : 119.

⁴³ Damayanti, Analisis ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017) : 39.

dengan tingkat PDRB perkapita antar daerah. Ketimpangan antar daerah pada dasarnya terjadi karena struktur dan pola lokasi serta konsentrasi kegiatan ekonomi antar ruang pada suatu daerah. Struktur dan pola lokasi tersebut ditentukan oleh distribusi kegiatan ekonomi antar ruang yang sangat dipengaruhi oleh keuntungan lokasi dari masing – masing tempat yang cenderung menimbulkan konsentrasi kegiatan ekonomi. Sementara itu, sebagaimana diungkapkan oleh Hirschman (1958) transmisi pertumbuhan ekonomi antar ruang ternyata juga tidak lancar sehingga cenderung menimbulkan adanya daerah yang bertumbuh cepat (*growing points*) dan daerah yang bertumbuh lambat (*lagging regions*).

Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan pada titik yang paling ekstrem diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.⁴⁴

Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan

⁴⁴ Dr. Windhu Putra, S.E.,M.Si. Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT) Ed. 1, Cet 1, - (Depok : Rajawali Pers). 2020.

wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain:

1. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju.
2. Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar.
3. Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia.
4. Belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara langsung.
5. Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.
6. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.
7. Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal.

Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
2. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah.
3. Belum optimalnya dukungan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta.
4. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah.
5. Masih lemahnya koordinasi sinergi, dan kerja sama di antara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi,

dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan.

6. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi.
7. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik serta ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah. serta
8. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerja sama antarwilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Sebenarnya, wilayah strategis dan cepat tumbuh ini dapat dikembangkan secara lebih cepat, karena memiliki produk unggulan yang berdaya saing. Jika sudah berkembang, wilayah – wilayah tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah – wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang.

Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang. Wilayah perbatasan, termasuk pulau – pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.

Permasalahan utama dari keteringgalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi '*inward looking*' sehingga seolah – olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau – pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Di antaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Pembangunan wilayah pada dasarnya berlangsung di wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh Nusantara. Pembangunan perkotaan dan perdesaan ini saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah yang sinergis. Namun, hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kota – kota sebagai motor penggerak (*engine of development*) belum berjalan dengan baik, terutama kota – kota di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Di samping itu, pembangunan kota – kota yang hierarkis juga belum sepenuhnya terwujud sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Keterkaitan antar kota – kota dan antar kota – desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Masih banyak di antaranya yang berdiri sendiri atau bahkan saling merugikan. Akibatnya dari kesemua hal tersebut adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ketidakeimbangan pertumbuhan antar kota – kota besar, metropolitan dengan kota – kota menengah dan kecil. Pertumbuhan kota – kota besar dan metropolitan saat ini masih terlalu terpusat di Pulau Jawa-Bali,

sedangkan pertumbuhan kota – kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Secara fisik, hal ini ditunjukkan oleh:

1. Meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya *fringe-area* terutama di kota – kota besar dan metropolitan.
2. Meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan sub-urban yang telah mengintegrasikan kota – kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak terkendali.
3. Meningkatnya jumlah desa kota.
4. Terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama di Jawa).
5. Kecenderungan di provinsi-provinsi trans border (Kalimat Timur, Riau, Sumatera Utara) memiliki persentase penduduk urban yang perkembangan wilayah tinggi.
6. Kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk kota inti kawasan metropolitan menurun, sedangkan di daerah sekitarnya meningkat (terjadi proses pengkotaan kawasan perdesaan).

Kecenderungan perkembangan semacam ini berdampak negatif (*negative externalities*) terhadap perkembangan kota – kota besar dan metropolitan itu sendiri, maupun kota – kota menengah dan kecil di wilayah lain. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota – kota besar dan metropolitan antara lain adalah:

1. Terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota – kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Terjadinya secara terus – menerus konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri.
3. Menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya perusakan lingkungan dan timbulnya polusi.
4. Menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial – ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan.
5. Tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti.

Terjadinya permasalahan tersebut di atas mengindikasikan telah berlangsungnya *diseconomies of scale* karena terlalu besarnya jumlah penduduk perkotaan dan terlalu luasnya wilayah yang perlu dikelola secara terpadu.⁴⁵

Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota - kota di wilayah lain, yaitu:

1. Tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan dan terjadinya *over concentration* penduduk kota di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek (20% dari total penduduk perkotaan Indonesia).
2. Tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota – kota menengah dan kecil dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan.
3. Tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah.
4. Tidak sinergisnya pengembangan peran dan fungsi kota – kota dalam mendukung perwujudan sistem kota – kota nasional.
5. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

⁴⁵ Ibid. 279 – 280.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi proses industrialisasi, di mana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain dari pada itu, kegiatan ekonomi di wilayah pemerintah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pedesaan (*trickling down effects*), justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan pedesaan (*backwash effects*).

Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek sering kali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (depleksi) sumber daya alam serta lingkungan hidup. Selain itu, sering kali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor, contohnya adalah terjadinya konflik antar kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah.

2. Ukuran Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Ukuran Ketimpangan pembangunan antar daerah yang mula – mula dilakukan oleh Williamson Index yang

digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada penggunaan awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antardaerah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi daerah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar daerah.

Williamson index menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antardaerah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Ini berarti bahwa data yang relevan untuk digunakan sebagai dasar pengukuran ketimpangan regional adalah PDRB perkapita untuk masing – masing daerah. Dengan demikian, formulasi Indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan dengan formula sebagai berikut.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana :

IW : Indeks Williamson

Y_i : PDRB Perkapita di Kabupaten/Kota i .

Y : PDRB Perkapita Provinsi

F_i : Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i

n : Jumlah penduduk Provinsi.⁴⁶

Indeks Williamson (tingkat ketimpangan) yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, semakin

⁴⁶ Gracetyani O, Juliana R, & Lyndon R. “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara”. *Agrisocio ekonomi* 16, no.3 (2020) : 369.

mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pembangunan semakin rendah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara merata. Jika indeks williamson mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan semakin tinggi serta mengidentifikasi adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata.⁴⁷

3. Penyebab Umum Terjadinya Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah

Penyebab tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) dan akan mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidak seimbangan (Myrdal 1975).⁴⁸ Pelaku – pelaku yang mempunyai kekuatan dipasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (Arsyad, 1999).⁴⁹

Adapun hal – hal penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah yakni :

a) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antardaerah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing – masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah mempunyai deposit batu bara cukup besar, tetapi daerah lain tidak ada. Demikian pula

⁴⁷Arif Maulana. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan” 19, no.1 (2019).

⁴⁸ Myrdal, G, & Sitohang, P. *Economic theory and under – developed regions*. (1957).

⁴⁹ Arsyad, L. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta. (1999).

halnya dengan tingkat kesuburan lahan pada lokasi tertentu yang juga ternyata sangat bervariasi sehingga sangat mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing – masing daerah.

Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat, Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam yang lebih sedikit hanya akan dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan pula daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam ini dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antardaerah yang lebih tinggi pada suatu negara.

b) Perbedaan kondisi demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antardaerah adalah bila mana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antardaerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kondisi demografis ini kemudian akan dapat pula mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja

masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. Kondisi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan investasi ke daerah bersangkutan sehingga akan cenderung pula peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

c) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antardaerah dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi antardaerah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antardaerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya.

Akibatnya ketimpangan ekonomi antardaerah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya.

d) Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada daerah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan ekonomi antardaerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bilamana konsentrasi kegiatan

ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.

Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misal terdapatnya minyak bumi, gas, batu bara, dan bahan mineral lainnya. Disamping itu, terdapatnya lahan yang subur juga turut memengaruhi kegiatan ekonomi, khususnya menyangkut dengan kegiatan pertanian. Kedua, lebih meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara yang juga ikut memengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Ketiga, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi di mana sumber daya manusia tersedia dalam jumlah cukup dan dengan kualitas yang lebih baik.

e) Alokasi dana pembangunan antardaerah

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bila mana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah tertentu ternyata lebih rendah sehingga kegiatan

ekonomi dan pembangunan daerah kurang berkembang baik.⁵⁰

4. Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antarwilayah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, pada pembahasan ini Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara atau wilayah.⁵¹

1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah adalah karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam yang cukup besar antardaerah. Sementara itu, ketidaklancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antardaerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah.

Upaya untuk mendorong kelancaran mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana perhubungan ke seluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan di sini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antardaerah. Sejalan dengan hal tersebut jaringan dan

⁵⁰ Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada. 2012.

⁵¹ Ibid. 122.

fasilitas telekomunikasi juga sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terisolir dan tidak dapat berkomunikasi dengan daerah lainnya.

Di samping itu, pemerintah perlu pula mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antardaerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar, dengan cara demikian, daerah yang kurang maju akan dapat pula meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi di daerahnya, sehingga kegiatan produksi dan penyediaan lapangan kerja akan dapat pula ditingkatkan. Semua ini akan mendorong proses pembangunan ekonomi pada daerah yang kurang maju.

2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong Pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah, sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

Indonesia sudah sejak lama melaksanakan program transmigrasi ini untuk mencapai dua tujuan secara sekaligus. Pertama, program transmigrasi ini dilakukan untuk dapat mengurangi kepadatan penduduk yang terdapat di pulau Jawa yang telah memicu peningkatan

pengangguran dan kemiskinan. Kedua, program transmigrasi tersebut juga dilakukan dalam rangka mendorong proses pembangunan ekonomi di daerah terbelakang yang menjadi tujuan transmigrasi, sehingga lahan yang luas tetapi belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan tenaga kerja akan dapat diatasi. Dengan digerakkannya kegiatan pertanian melalui pemanfaatan tenaga transmigran tersebut, maka kegiatan ekonomi pada daerah terbelakang tujuan transmigrasi akan dapat ditingkatkan sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat dikurangi.

3. Pengembangan Pendidikan Antarwilayah

Banyak kalangan ahli berpendapat bahwa pengembangan pendidikan pada semua tingkat merupakan salah satu unsur penting untuk mendorong proses pembangunan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat wilayah. Alasannya jelas karena pengembangan pendidikan akan dapat mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Di samping itu, melalui pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong proses inovasi dan perbaikan teknologi produksi yang selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha.

Bertitik tolak dari pandangan ini, pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang diperkirakan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sebagaimana diungkapkan oleh Garcia Jorge dan Soelistianingsih (1998) bahwa "*Education constitute an efective efforts to increase the rate of growth and reduce inequality in provincial GDP percapita*". Dalam hal ini tekanan pembangunan sebaiknya diberikan pada pengembangan pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan memberikan kejuaraan yang merupakan

kebutuhan umum dan perkiraan akan dapat memberikan pengaruh cukup besar terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja antarwilayah.

4. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah adalah melalui pengembangan Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles*) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha tersebut, Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antardaerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dikurangi.⁵²

Penerapan konsep Pusat Pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat – pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah. Dengan cara demikian, kota-kota skala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan ekonomi dapat lebih disebarakan ke pelosok daerah, Sedangkan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah melalui peningkatan pembangunan daerah pedesaan ternyata sering gagal dilakukan karena hal ini tidak dapat mempertahankan tingkat efisiensi produksi karena lokasinya yang sangat terpencar. Di samping itu, pemilihan lokasi kegiatan ekonomi di daerah

⁵² Ibid.123 – 125.

pedesaan juga sering kali tidak memenuhi persyaratan ekonomi dari segi analisis keuntungan lokasi yang dapat mendukung pengembangan usaha pada daerah bersangkutan.

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hal ini jelas karena, dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih di gerakkan karena adanya wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan mulai tahun 2001 yang lalu. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing (desentralisasi pembangunan). Sejalan dengan hal tersebut, masing-masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk "*Block Grant*" berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan cara demikian, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan akan dapat berjalan dengan baik, sehingga proses pembangunan ekonomi daerah dapat

lebih ditingkatkan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi.⁵³

Dengan adanya Pola – pola pemberdayaan tersebut tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, adapun bentuk yang tepat adalah memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Masyarakat diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri baik berasal dari pemerintah maupun amil zakat, perbaikan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan yang lebih baik, serta pembekalan perkembangan ilmu teknologi untuk strategi meningkatkan produksi dan peningkatan pendapatan. Begitupun dengan sasaran pemberdayaan masyarakat juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian akan terciptanya *good governance* yang mana akan menjalin adanya kesejahteraan, keadilan, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.⁵⁴

5. Ketimpangan Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab mencakup segala aspek kehidupan baik aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan berkembang pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan berbagai pendekatan mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari

⁵³ Ibid.126.

⁵⁴ Madnasir & Liya Ermawati. Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Relevansinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah. AT – TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Vol. VIII, No.II. 2023.

masalah – masalah ekonomi rakyat yang dijiwai oleh nilai – nilai islam. Mustafa Nasution menjelaskan berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis saat ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara.⁵⁵

Dalam pandangan sistem ekonomi islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat yang membuat timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.⁵⁶ Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi wilayah. Dalam perspektif islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material saja, tetapi juga segi spiritual dan moral, oleh karena itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.⁵⁷

Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila PDB riil negara meningkat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan distribusi yang adil dan merata akan menyebabkan ketimpangan. Adanya ketimpangan ekonomi akan menimbulkan masalah – masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, maupun kemampuan daya beli masyarakat menurun. Oleh

⁵⁵ Beik, Irfan. S., & Arsyianti, Lili D. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.

⁵⁶ Munthe, Marabon. “Konsep Distribusi Dalam Islam”. *Jurnal Syariah*. Vol, 2, No.1. 2014.

⁵⁷ Huda, Nurul,dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Kencana. 2017.

karena itu, ketimpangan merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi.⁵⁸

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, hasil – hasil produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas wajar apalagi dengan cara yang tidak benar.

Keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah agar kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi.⁵⁹ Tela'ah terhadap ekonomi islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam islam sebagai solusi menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap

⁵⁸ Aprianto, Naerul Edwin K. “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam”. Jurnal Hukum Islam. Vol. 14, No.2. 2016.

⁵⁹ Rahmawaty, Anita. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”. Equilibrium. Vol.1, No.1. 2013.

aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan (Khan, 2005). Ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran dalam masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha – usaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakatnya. Peran kedua institusi tersebut sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.

C. Aglomerasi Industri

Aglomerasi merupakan istilah bagi terjadinya pemusatan kegiatan perekonomian (industri – industri) dalam suatu wilayah.

1. Pengertian Industri

Menurut undang – undang tentang perindustrian No. 5 tahun 1984, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Dalam sudut pandang teori ekonomi mikro Hasibuan mendefinisikan industri sebagai kumpulan perusahaan – perusahaan yang menghasilkan barang – barang homogen/barang – barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun demikian, dari sisi pembentukan pendapat secara

makro, industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah.⁶⁰

Proses produksi harus dipandang sebagai suatu peningkatan terus menerus dari sederet siklus yang diawali dengan adanya ide – ide untuk menghasilkan produk, pengembangan produk, proses produksi sampai pada distribusi kepada konsumen. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Kegiatan proses produksi dalam industri inilah disebut perindustrian.

Industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri tersebut dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang.
2. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang.
3. Industri menengah dengan jumlah tenaga kerja 20 – 99 orang
4. Industri besar dengan jumlah tenaga kerja ≥ 100 orang.⁶¹

2. Pengertian Aglomerasi

Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas tentang konsep aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah Marshall disebut dengan industri yang terlokalisasi (*localized industries*). *agglomeration economies* atau *localized industries* menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung jangka panjang sehingga masyarakat akan

⁶⁰ Hasibuan, Nurimansyah. Ekonomi Industri : Persaingan Monopoli dan Regulasi. Yogyakarta : LP3ES. 1993.

⁶¹ BPS. [https://www. BPS.go.id/subject/9/industri.html](https://www.BPS.go.id/subject/9/industri.html).

banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut. Sehingga penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja dan konsumen secara spasial untuk meminimalisasi biaya – biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi.⁶²

Aglomerasi sendiri adalah pemusatan kegiatan – kegiatan ekonomi dilokasi – lokasi tertentu dengan dipengaruhi oleh keadaan permintaan pasar dan kemungkinan penghematan biaya produksi. Literatur ekonomi regional dan perkotaan menjelaskan mengapa aktivitas ekonomi, khususnya industri manufaktur cenderung untuk terkonsentrasi secara geografis di beberapa tempat saja. Analisis aglomerasi industri menggunakan Indeks Balassa yaitu semakin tinggi nilai indeks balassa menunjukkan aglomerasi yang sangat kuat. Aglomerasi dikatakan kuat bila angka indeks balassa di atas 4, rata – rata atau sedang bila nilainya antara 2 dan 4, lemah bila nilainya diantara 1 sampai 2, sedangkan nilai 0 sampai 1 berarti tidak terjadi aglomerasi atau wilayah tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif untuk terjadinya aglomerasi.⁶³

Teori – teori lokasi tradisional berpendapat bahwa kluster (pengelompokan) industri muncul terutama akibat minimisasi biaya transport atau biaya produksi.⁶⁴ Hal yang menyebabkan penyebaran industri tidak merata, disatu sisi aglomerasi di pedesaan memberikan pendapatan yang besar serta investasi yang tinggi bagi

⁶² Indah Sri Rejeki. Peran Aglomerasi dalam Penyebaran Investasi Asing Langsung (FDI), Jurnal Kebijakan Ekonomi, Vol. 14, ISS 1, Article 3. (2019).

⁶³ Imelda, S.E., M.E. Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah : Tinjauan Teoritis dan Empiris. Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. (2021) : 159 – 160.

⁶⁴ Mudrajad kuncoro. Otonomi & Pembangunan Daerah : reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang (Jakarta : Erlangga, 2004) : 129 – 130.

industri tidak merata, disatu sisi aglomerasi dipedesaan memberikan kemudahan akses memperoleh bahan baku dan disisi lain aglomerasi industri diperkotaan memberikan pendapatan yang besar serta investasi yang tinggi bagi industri. Munculnya aglomerasi disuatu wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi.

3. Teori Aglomerasi

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang aglomerasi,⁶⁵ diantaranya yaitu :

1) Teori Neo Klasik

Sumbangan terbesar dari teori neo klasik adalah pengenalan terhadap ekonomi aglomerasi dengan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari keuntungan aglomerasi berupa ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Asumsi yang digunakan oleh teori neo klasik adalah *constant return to scale* dan persaingan sempurna.

Alferd Weber dikenal sebagai pendiri teori lokasi modern yang berkenaan dengan tempat, lokasi, dan geografi dari kegiatan ekonomi. Minimisasi biaya yang di kombinasikan antara bobot dengan input – input yang berbeda dari perusahaan dan industri menentukan lokasi optimal bagi suatu perusahaan. Weber secara eksplisit memperkenalkan konsep ekonomi aglomerasi, skala efisien minimum, keterkaitan kedepan dan kebelakang. Konsep ini yang menjadi dasar berkembangnya teori perdagangan regional baru.

Dalam sistem perkotaan teori neo klasik, mengasumsikan dengan adanya persaingan sempurna sehingga kekuatan sentripental aglomerasi disebut

⁶⁵ Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar. Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, (Oktober 2007) : 119 – 120.

sebagai ekonomi eksternal murni. Kekuatan sentripetal muncul dari kebutuhan untuk pulang – pergi (*commute*) ke pusat bisnis utama dalam masing – masing kota yang menyebabkan suatu *gradien* sewa tanah dalam masing – masing kota. Menurut Krugman (1998), keterbatasan teori neo klasik diantaranya adalah melihat bahwa ekonomi eksternal yang mendorong adanya aglomerasi masih dianggap sebagai misteri (*blackbox*). Disamping itu sistem perkotaan neo klasik adalah non spasial yang hanya menggambarkan jumlah dan tipe kota tetapi tidak menunjukkan lokasinya.

2) Teori Eksternal Dinamis

Teori – teori eksternalitas dinamis percaya bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide, maka transfer teknologi merupakan hal penting bagi kota. Teori eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Marshall – Arrow – Romer (MAR), porter dan jacob. Teori – teori ini mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan mengapa kota tumbuh.

Eksternalitas MAR menekankan pada transfer pengetahuan antar perusahaan dalam suatu industri. Menurut MAR monopoli lokal merupakan hal yang lebih dibandingkan dengan kompetisi lokal sebab lokal monopoli menghambat aliran ide dari industri lain dan diinternalisasi oleh innovator. Seperti hal MAR, porter mengatakan bahwa dengan transfer pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan mendorong pertumbuhan.

Berbeda dengan MAR, Porter menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat adopsi inovasi. Tidak seperti MAR dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer pengetahuan paling penting adalah berasal dari industri – industri ini. Variasi dan

keberagaman industri yang berdekatan secara geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan dengan spesialisasi secara geografis.

3) Teori Ekonomi Geografi Baru (*The New Economic Geography*)

Teori ekonomis baru berupaya untuk menurunkan efek – efek aglomerasi dari interaksi besarnya pasar, biaya transportasi dan *increasing return* dari perusahaan. Teori ekonomi geografis baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas srikular untuk menjelaskan konsentrasi pasial dari kegiatan ekonomi.

4. Keuntungan Aglomerasi

Keuntungan aglomerasi pada dasarnya merupakan kekuatan utama dari sebuah pusat pertumbuhan. Alasannya adalah karena aglomerasi dapat memberikan keuntungan eksternal baik dalam bentuk penurunan biaya atau peningkatan peluang pasar bagi para pengusaha yang beroperasi dalam pusat tersebut. Karena itu, dapat dikatakan bahwa bila mana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan oleh sebuah pusat pertumbuhan cukup besar, maka pusat tersebut akan dapat berkembang dengan pesat. Akan tetapi sebaliknya pusat tersebut akan sulit berkembang bila mana keuntungan aglomerasi yang dapat dihasilkan sangat terbatas atau tidak sama sekali. Keuntungan aglomerasi baru dapat muncul bila terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik dalam bentuk keterkaitan dengan *input* atau keterkaitan dengan *output*. Dengan adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk penghematan biaya penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan dapat menurunkan biaya yang harus

dikeluarkan oleh para pengusaha, sehingga daya saing nya menjadi semakin meningkat. Penurunan biaya inilah yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan efisiensi dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berada dalam kawasan pusat pertumbuhan ekonomi tersebut.⁶⁶

Menurut Isard, keuntungan aglomerasi meliputi tiga unsur utama, yaitu :⁶⁷

- 1) Keuntungan skala besar, merupakan keuntungan yang diperoleh dalam bentuk penurunan biaya produksi rata – rata perunit, karena produksi dilakukan dalam skala besar. Perusahaan berlokasi dalam suatu pusat pertumbuhan dimana didalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang sangking terkait satu sama lain baik dari segi input maupun output. Kemudian akan menimbulkan daya tarik bagi investor untuk datang dan mengembangkan kegiatan produksi dalam pertumbuhan ekonomi.
- 2) Keuntungan lokalisasi, adalah keuntungan dalam bentuk penghematan ongkos angkut, baik untuk bahan baku dan hasil produksi yang timbul karena berlokasi secara terkonsentrasi dengan perusahaan dalam sebuah pusat pertumbuhan. Keuntungan eksternal ini selanjutnya akan menjadi faktor pengembangan produksi dan sekaligus menjadi daya tarik yang cukup besar bagi industri lain untuk masuk dan berlokasi dalam pusat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Keuntungan urbanisasi, yaitu keuntungan yang muncul karena penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersama seperti : listrik, pergudangan, telepon, air minum dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. Alasan utama nya adalah karena penggunaan fasilitas, secara

⁶⁶ Sjafrizal. Ekonomi Wilayah dan perkotaan (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) : 147.

⁶⁷ Ibid. 148- 150.

bersama akan dapat menurunkan biaya dan dapat ditanggung secara bersama.

5. Menghitung Aglomerasi Industri

Sbergami (2002) menjelaskan bahwa aglomerasi industri dapat diukur melalui beberapa cara, diantaranya :

1. Menghitung jumlah penduduk perkotaan (*urban area*) dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk tersebut.
2. Menghitung output produksi yaitu dengan menggunakan PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi.
3. Menghitung jumlah tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam suatu provinsi.⁶⁸

Ketiga konsep tersebut adalah indikator dari aglomerasi yang disebut dengan Indeks Balassa. Penelitian ini menggunakan konsep ketiga, maka tingkat aglomerasi yang dihitung merupakan gambaran dari keadaan aglomerasi industri yang dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja sektor industri. Adapun untuk menghitung Indeks Balassa, digunakan Rumus yaitu:

$$\left[\frac{E_{ij}}{\sum_j E_{ij}} \right] / \left[\frac{\sum_i E_{ij}}{\sum_i \sum_j E_{ij}} \right]$$

Keterangan :

E_{ij} : Total tenaga kerja pada sektor industri tingkat Kabupaten/Kota.

$\sum_j E_{ij}$: Total tenaga kerja tingkat Kabupaten/Kota.

$\sum_i E_{ij}$: Total tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi.

$\sum_i \sum_j E_{ij}$: Total tenaga kerja di tingkat Provinsi.

⁶⁸ Sbergami, Federica. *Agglomeration and Economic Growth : Some Puzzles Graduate Institute of International Studies. Geneva. 2002.*

Semakin terpusatnya suatu industri, semakin besar Indeks Balassanya. Tingkat aglomerasi dibedakan menjadi :

1. Aglomerasi kuat apabila angka indeks balassa di atas 4.
2. Aglomerasi rata – rata atau sedang apabila angka indeks balassa diantara 2 sampai 4.
3. Aglomerasi lemah bila angka indeks balassa diantara 1 sampai 2
4. Tidak terjadi aglomerasi apabila angka indeks balassa antara 0 sampai 1. (Sbergami, 2002).

6. Hubungan Aglomerasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri didaerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah – daerah lainnya. Disamping itu, pola pemusatan dimana terdapat kumpulan berbagai jenis industri pada suatu tempat tertentu, sehingga mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal yang dalam hal ini adalah penghematan aglomerasi. Hal ini berarti suatu industri dapat mengakibatkan terkumpulnya faktor – faktor pendukung industri tersebut dan terkonsentrasinya kegiatan industri diwilayah tertentu akan menciptakan aglomerasi yang membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.⁶⁹

⁶⁹ Matitaputty, Shandy Jennifer. Analisis Pengaruh Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan dengan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 1994 – 2007. Skripsi. Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro : Semarang. 2010.

7. Aglomerasi dalam Ekonomi Islam

Manusia adalah khalifah dimuka bumi, islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada khalifah agar dipergunakan sebaik – baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul-nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Begitupun dalam berekonomi, manusia diperintahkan oleh Allah SWT agar segala kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat membawa masalah baik untuk dirinya maupun orang lain. Didalam industri, proses produksi dalam ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*Utility*) baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang, Sedangkan tujuan dari produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum bagi konsumen.

Menurut Mannan proses produksi usaha kerjasama antar para anggota masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa bagi kesejahteraan ekonomi mereka. Nilai persaudaraan jika diaplikasikan kedalam lingkungan ekonomi, akan melahirkan lingkungan kerjasama, bukan persaingan, penyebaran lebih luas atau sosialisasi sarana produksi bukan konsentrasi maupun eksploitasi sumber daya alam dan manusia lebih lanjut.

Firman Allah SWT dalam Al – Qur’an surat (Al – Baqarah : 22) :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah – buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan pertandingan – pertandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al – Baqarah [2] : 22).

Ayat diatas sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah dimuka bumi ini yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT berupa kekayaan alam yang sangat melimpah untuk dapat dipergunakan sebagai modal berproduksi dan dapat diolah untuk kemaslahatan bersama.⁷⁰

D. *Human Capital Investment*

1. Pengertian *Human Capital Investment*

Human Capital secara harfiah adalah dapat diartikan sebagai modal manusia. Namun jika di deskripsikan lebih lanjut, modal manusia ini merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset didalam perusahaan. *Human Capital* merupakan konsep yang menjelaskan bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan pertumbuhan, seperti aset – aset fisik misalnya mesin dan modal kerja.⁷¹

Menurut Becker (1993 : 71) konsep utama dari *Human Capital* adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya, namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

⁷⁰ Damayanti. Analisis ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017) : 112 - 113

⁷¹ Muhammad Ivan ed., Literasi dan *Human Capital*. (Yogyakarta : Samudra Biru,2021) : 1.

mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi.⁷²

Teori manusia sebagai modal ataupun teori *Human Capital* lebih dikenal setelah Theodore Schultz, memperoleh nobel ekonomi ditahun 1979. Awalnya teori *Human Capital* dikembangkan oleh Adam smith. Usaha mengangkat masyarakat miskin menjadi sejahtera menurut teori *Human Capital* tidak tergantung pada uang, lahan, teknologi ataupun kelengkapan industri, melainkan bergantung pada pengetahuan yang dimiliki sebagai modal utama. Manusia menjadi aset utama dalam kegiatan ekonomi, kecerdasan dan juga keterampilan merupakan hasil pendidikan yang akan disumbangkan menjadi sebuah karya nyata yang memajukan perekonomian. Teori ini berkonsentrasi pada manusia sebagai faktor produksi yang dominan dalam mengaktifkan peralatan, barang, sumber daya maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh manusia sebagai penggerak utama faktor produksi (jourahotun, 2018). Modal manusia adalah istilah ekonom untuk pengetahuan dan keahlian yang diperoleh pekerja melalui pendidikan, pelatihan serta pengalaman.

Modal manusia meningkatkan kemampuan sebuah negara untuk memproduksi barang dan jasa. Asumsi dasar teori modal manusia yaitu seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan (Mankiw, 2003). Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu sisi meningkatkan kemampuan bekerja, akan tetapi disisi lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Sehingga peningkatan pendidikan tersebut dapat dikatakan sebagai investasi bagi sumber daya manusia (Borjas, 2016).⁷³

⁷² Backer, G. S. Garry S. *Human Capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. The university of chicago press.* 1993.

⁷³ Borjas, George J. *Labor Economics (Seventh Edition).* New York : McGraw – Hi. 2016.

Menurut Todaro dan Smith (2011), modal manusia merupakan investasi produktif terhadap manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan, dan lokasi sering kali dihasilkan dari pengeluaran dibidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan, dan perawatan kesehatan. Pembentukan modal manusia yaitu proses untuk memperoleh dan juga meningkatkan manusia yang memiliki keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan juga produktif.⁷⁴

Dalam *Human Capital Theory* ada tiga aspek *Human Capital*, yaitu:

1. *Intellectual Capital*, konsep *Human Capital* berhubungan dengan konsep *intellectual capital*, yang didefinisikan sebagai persediaan dan aliran pengetahuan yang tersedia bagi organisasi. Modal ini merupakan sumber daya *intangibel* yang terikat dengan karyawan, yang bersama sumber daya *tangibel* (uang dan aset fisik) memberikan nilai bisnis bagi organisasi.
2. *Social Capital*, adalah unsur lain dari *intellectual capital*, yakni bahwa pengetahuan berasal dari hubungan didalam dan diluar organisasi. Putnam (1996) mendefinisikan *social capital* berupa jaringan, norma dan kepercayaan (*trust*) yang membuat seseorang dapat berusaha secara efektif meraih tujuan organisasi. Menurut Bontis (1998) dalam Armstrong (2006), sumber daya yang *intangible* adalah faktor lain selain aset finansial dan fisik yang berkontribusi bagi organisasi.
3. *Organizational Capital*, adalah pengetahuan yang telah dimiliki oleh organisasi, yang

⁷⁴ Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1, Jakarta : Erlangga. 2011.

diimplementasikan dalam sebuah basis data, manual dll.⁷⁵

Human Capital Investment dapat diartikan bahwa pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, yang dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang maka akan semakin meningkat pula produktifitas kerja orang tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya. Menurut Aloysius sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan dengan beberapa sektor, sumber daya manusia dapat dibangun melalui peran sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sebab kedua sektor ini menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia yang dapat diserap untuk mengelola sumber – sumber pertumbuhan ekonomi.⁷⁶

Human Capital Investment atau investasi modal manusia sama halnya dengan istilah modal insani. Menurut Todaro, modal insani atau modal manusia adalah investasi produktif terhadap orang – orang, mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi sering kali dihasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan, dan perawatan kesehatan. Investasi modal manusia pada dasarnya sama dengan investasi faktor produksi lainnya. Dalam hal ini juga diperhitungkan *rate of return* (manfaat) dari investasi pada modal manusia. Bila seseorang akan melakukan

⁷⁵ Armstrong, M. A *Handbook of HRM practice*. Kogan page publishers. 2006.

⁷⁶ Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2010.

investasi, maka ia harus melakukan analisis biaya terlebih dahulu.⁷⁷

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemikirannya Theodore Schultz tentang *Investment in Human Capital*. Menurutinya pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan dan bukan merupakan suatu bentuk investasi. Dalam perkembangannya, Schultz memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.⁷⁸

Secara empiris kondisi SDM di negara maju dengan negara sedang berkembang berbeda baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Negara sedang berkembang dihadapkan kepada suatu realitas bahwa produktivitas tenaga kerjanya rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas SDM masih rendah, sedangkan di negara-negara maju, pendidikan dapat menjadi sebagai suatu investasi modal manusia (*human capital investment*). Akibatnya kualitas SDM nya tinggi sehingga produktivitas tenaga kerjanya juga tinggi.

Terdapat dua pendekatan penting dalam teori *human capital* yaitu: pendekatan Nelson-Phelps (1966) dan pendekatan Lucas (1988). Pendekatan oleh Nelson-Phelps, Aghion dan Howitt (1966) menyimpulkan bahwa *human capital* merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Munculnya

⁷⁷ Atmanti, Hastrarini Dwi. Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2, No. 1. (2005) : 30 – 39.

⁷⁸ Dr. Windhu Putra, S.E.,M.Si. *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*, Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT) Ed. 1, Cet 1, - (Depok : Rajawali Pers). 2020.

perbedaan dalam tingkat pertumbuhan di berbagai negara lebih disebabkan oleh perbedaan dalam *capital*. Aghion dan Howitt mendukung pendekatan Nelsom Phelps tentang *stock human capital* yang menyimpulkan bahwa angkatan kerja yang lebih ahli dan terdidik akan lebih mampu mengisi kualifikasi lapangan pekerjaan yang ditentukan. Dengan kata lain, pekerja yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mampu merespons inovasi yang selanjutnya akan meningkatkan (2000: 216), Sedangkan pendekatan Lucas (1988) lebih menekankan adanya suatu signifikansi akumulasi *human capital* terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya terdapat dua faktor yang menjadi penyebab adanya pembentukan *human capital* di suatu negara. Kedua faktor tersebut adalah pendidikan dan *learning by doing*.

Modal manusia dapat menjadi sumber daya manusia yang andal dalam pembangunan apabila kualitasnya tinggi. Dalam hal ini sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peranan penting dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga kelangsungan pembangunan itu sendiri. Dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan ekonomi, maka Krugman (1994) mengatakan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi lebih penting peranannya dalam pembangunan. Hal ini karena kegiatan dalam akumulasi modal fisik dapat mengakibatkan penambahan hasil yang menurun dalam penggunaan modal (*marginal diminishing return of capital*), sedangkan pembangunan membutuhkan kelangsungan dalam jangka panjang, sehingga adanya investasi sumber daya manusia dapat meningkatkan kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kenaikan produktivitas penduduk (Deolalikar, 1957)

Sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara sedang berkembang merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan

dengan negara lain. Era informasi dan teknologi yang berkembang dewasa ini semakin membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks proses produksi, maka adanya penguasaan teknologi yang baik, maka akan mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk – produk baru dan cara produksi yang lebih efisien (Barro, 1991: 408; Mankiw, dkk., 1992: 92, Romer, 1994: 36).

Guna mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan beberapa upaya, di antaranya adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Schultz mengemukakan beberapa upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, di antaranya adalah terdapatnya pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan pada tingkat tinggi (Jhingan, 1996: 521 522).

Manfaat dari adanya pendidikan bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari pendapat Todaro (2000: 343), yakni:

1. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian.
2. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
3. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan.
4. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.

Perkembangan dalam kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai aspek. Berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa terdapat beberapa parameter untuk mengetahui perkembangan kualitas sumber daya manusia, seperti angka indeks guna pendidikan (Bank Dunia, 2000: 206); angka melek huruf, kesehatan dan pendidikan.

Dalam penelitian ini, variabel *human capital investment* diukur berdasarkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. menurut UNDP, tiga kemampuan dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat mengukur peluang hidup atau harapan hidup, berpengetahuan dan berketerampilan serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang lebih layak. IPM diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam *Human Development Report* (HRD). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Nilai IPM berkisar antara 0 – 100. Terdapat tiga dimensi pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup (AHH), pengetahuan yang diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata – rata lama sekolah (RLS) serta standar hidup layak diukur dengan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).⁷⁹

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut⁸⁰ :

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,0

⁷⁹ Bps Indonesia, <https://www.bps.go.id/>.

⁸⁰ Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS setiap tahun yang mencakup seluruh Provinsi di Indonesia.

2. Menengah atas : IPM antara 66,0 – 79,9
3. Menengah bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu index komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yakni⁸¹ :

a. Usia hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa di notasiak dengan *eo*. Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak maju. Seperti halnya IMR, *eo* sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia, *eo* dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yakni rata – rata anak yang dilahirkan hidup dan rata – rata anak yang masih hidup.

b. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dari pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yakni angka melek huruf (*Literacy Rate*) dan rata – rata lama sekolah (*Mean Years School*).

⁸¹ BPS Indonesia, <https://www.bps.go.id/>.

c. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsure ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP percapita*) sebagai indikator hidup layak. Berbeda dengan indikator untuk kedua unsure IPM lainnya, indikator hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai dengan unsure IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan IPM.

Tahapan perhitungan IPM adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pertama perhitungan IPM adalah menghitung indeks masing – masing komponen IPM (Indeks harapan hidup = X1, pengetahuan = X2 dan standar hidup layak = X3)

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}}] / [X_{(i) \text{ max}} - X_{(i) \text{ min}}]$$

Keterangan :

$X_{(i)}$ = indikator ke – i (i = 1,2,3)

$X_{(i) \text{ min}}$ = nilai minimum $X_{(i)}$

$X_{(i) \text{ max}}$ = nilai maksimum $X_{(i)}$

Tabel 2.1
Nilai maksimum dan nilai minimum indikator
komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global(UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global(UNDP)
Rata – rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global(UNDP)
Konsumsi perkapita yang disesuaikan	732,72	300.000 (1996)	UNDP menggunakan GDP perkapita rill yang disesuaikan

Sumber : Manual Teknis Operasional Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perencanaan Pembangunan Manusia (BPS, Bappenas, UNDP).

2. Tahapan kedua adalah menghitung rata – rata sederhana dari masing – masing indeks X_i dengan rumus :

$$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$$

Keterangan :

$X_{(1)}$ = indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$ = indeks melek huruf (2/3) AMH + (1/3) indeks RLS

$X_{(3)}$ = indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan.

3. Tahapan ketiga adalah menghitung reduksi Shortfall yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu dengan rumus :

$$r = \{ (IPM_{t+n} - IPM_t) / (IPM_{ideal} - IPM_t) \times 100 \}^{1/n}$$

Keterangan :

IPM_t = IPM pada tahun t

IPM_{t+n} = IPM pada tahun t + n

IPM_{ideal} = 100

2. Kriteria *Human Capital Investment*

Salah satu dari problem yang paling menggelitik adalah masalah perkiraan produktivitas investasi di bidang pembentukan modal manusia, khususnya pendidikan. Para ahli ekonomi menyarankan kriteria berikut⁸² :

1. Kriteria Tingkat Pengembalian.

Pendidikan sebagai suatu investasi mempunyai dua komponen: Komponen konsumsi masa depan dan komponen penghasilan masa depan. Investasi di bidang keterampilan dan pengetahuan menaikkan penghasilan masa depan, sementara kepuasan yang diperoleh dari pendidikan merupakan komponen konsumsi. Sebagai suatu komponen konsumsi yang bersifat tetap, pendidikan merupakan sumber kegunaan masa depan yang sama sekali tidak masuk dalam pendapatan nasional yang terukur. Jadi dalam menghitung pengembalian investasi di bidang pendidikan, komponen penghasilan masa depan harus betul – betul diperhatikan. Metode yang dipakai didasarkan pada perbandingan antara penghasilan hidup rata – rata orang yang lebih berpendidikan dengan orang-orang yang kurang berpendidikan, yang bekerja dengan

⁸² M. L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Rajawali Pers, Ed. 1, Cet 17. 2016.

profesi sama. Sebagai contoh, Becker memperkirakan bahwa tingkat pengembalian investasi total pada pendidikan tinggi di Amerika Serikat bagi pria kota berkulit putih adalah 12,5 persen pada 1940 dan 10 persen pada 1950. Akan tetapi, itu menjadi 9 persen sesudah pemungutan pajak pada 1940 dan 1950.⁸³ Perkiraan ini mencakup biaya langsung mahasiswa, penghasilan yang hilang selama periode studi, dan uang sekolah.

Perkiraan seperti itu mempunyai beberapa kesulitan. Pertama, ia hanya mengukur keuntungan material langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh negara dari perbaikan pada tingkat masyarakat. Kedua, apa yang diperoleh rakyat tidak semata-mata karena pendidikan universitas, malah hal itu adalah hasil kemampuan alami, pengalaman, status sosial, koneksi famili, latihan kerja, dan lain-lain. Ketiga, perkiraan seperti itu hanya mengukur tingkat pengembalian investasi swasta di bidang pendidikan. Mereka secara tidak langsung mengukur pengaruh pendidikan pada output negara dengan mengasumsikan bahwa perbedaan penghasilan menggambarkan produktivitas. Tetapi upaya kolektif oleh berbagai kelompok (seperti dokter, pekerja tangan, guru dan ahli teknik melalui serikat buruh) dan faktor lainnya dapat mengubah penghasilan relatif pada perekonomian. Selain itu, tingkat pengembalian swasta tidak dapat dievaluasi di mana biaya penyelenggaraan sekolah boleh dibilang tidak berarti seperti sekolah guru yang diselenggarakan tanpa biaya banyak dusun di India. Keempat, pengembalian dari investasi dalam menciptakan keterampilan dan pengetahuan tidak menaikkan pendapatan individu yang bersangkutan tetapi kapasitas produktif total perekonomian. Kelima, menurut Eckaus, harga buruh berpendidikan yang dipakai dalam penghitungan tingkat pengembalian tersebut harus

⁸³ G.S. Backer, "*Under Investment In College Education*". AER, Mei 1960

menggambarkan kelangkaan relatif faktor – faktor yang terkait. Tetapi manakala sebagian besar biaya investasi pendidikan didukung oleh pemerintah, harga buruh berpendidikan tidak menggambarkan kelangkaan input faktor yang ditentukan dalam pasar yang bersaing. Selain itu, standar ini tidak dapat memberikan informasi mengenai berapa banyak dan pendidikan tambahan "macam apa" yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi.⁸⁴ Terakhir, sebagaimana diamati oleh Bowen, kesulitan yang terkait di dalam mengidentifikasi perbedaan penghasilan dengan perbedaan produktivitas memaksa orang sedikit lebih berhati – hati dalam mengambil kesimpulan yang umum mengenai pengaruh pendidikan pada output nasional.⁸⁵

2. Kriteria Sumbangan Pendidikan Pada Pendapatan Nasional Bruto.

Menurut kriteria ini, investasi di bidang pendidikan ditentukan oleh sumbangannya dalam menaikkan pendapatan nasional bruto atau pembentukan modal fisik dalam satu periode. Schultz menelaah sumbangan pendidikan pada pertumbuhan pendapatan nasional di Amerika Serikat dari 1900 sampai 1956, dan tiba pada kesimpulan bahwa sumber yang dialokasikan pada pendidikan naik sekitar 6,5 kali: dibandingkan dengan pendapatan konsumen dalam dolar; dan dibandingkan dengan pembentukan modal fisik bruto dalam dolar. Dengan kata lain, investasi di bidang pendidikan menyumbang 3,5 kali lebih banyak pada kenaikan pendapatan nasional bruto dari pada investasi di bidang modal fisik.⁸⁶ Demikian pula penelitian Denison menyatakan bahwa antara 1929 – 1957 investasi di bidang

⁸⁴ R.S. Eckaus. "Economic Criterion For Education and Training" RES, Mei 1964.

⁸⁵ W.G. Bowen, *Economic Aspect for Education*, 1964

⁸⁶ T.W . Schultz, *Capital Formation by Education*, JPE, Desember 1960.

pendidikan di Amerika Serikat menyumbang 23 persen dari pertumbuhan pendapatan riil total dan 42 persen dari pertumbuhan pendapatan nasional riil per orang yang bekerja.⁸⁷

3. Kriteria Faktor Residual

Solow, Kendrick, Denison, Jorgenson dan Griliches, Kuznets, serta ahli ekonomi lainnya telah mencoba mengukur seberapa besar proporsi kenaikan Produk Nasional Bruto, dalam satu periode, dapat dihubungkan dengan input modal dan buruh yang dapat diukur, dan seberapa proporsi kenaikan Pendapatan Nasional Bruto dapat dianggap berasal dari faktor lain, yang seringkali dikelompokkan sebagai "residual". Yang terpenting dari faktor residual ini adalah pendidikan, penelitian, latihan, skala ekonomi dan faktor lain yang mempengaruhi produktivitas manusia. Perkiraan Denison terhadap Amerika Serikat untuk 1929 – 1957 menyatakan bahwa sumbangan pendidikan pada pertumbuhan pendapatan nasional riil total adalah 23 persen. Sepanjang menyangkut faktor residual tersebut sumbangannya adalah sebesar 31 persen dari pertumbuhan total pendapatan nasional. Ini karena pengaruh kuat kemajuan ilmu pengetahuan (20 persen) dan ekonomi skala yang timbul dari pertumbuhan pasar nasional (11 persen).

Kriteria faktor Residual tidak lepas dari kelemahan tertentu. Pertama, faktor residual dipakai dalam pengertian yang sangat luas mencakup faktor yang beraneka ragam seperti ekonomi skala, perubahan teknis, disamping pendidikan, penelitian dan latihan. Faktor-faktor ini membuat rumit kriteria tersebut. Kedua, faktor residual juga dapat mencakup perbaikan pada asset modal yang tentu, dapat dikaitkan dengan perbaikan pada keterampilan dan pengetahuan manusia. Ketiga, Jorgenson

⁸⁷ E. Denison, *Education, Economic Growth and Gaps in Information*, (JPE, Supplement), 1962.

dan Griliches dalam studi mereka menyatakan bahwa "Residual" yang dihubungkan oleh Denison kepada kemajuan dalam pengetahuan tersebut tidak seberapa besar. Kenyataan bahwa residual tersebut kecil menandakan bahwa sumbangan investasi pada pertumbuhan ekonomi sebagian besar diimbangi oleh penghasilan investasi swasta (*private returns to investment*). Keempat, dalam studi mereka mengenai perekonomian Amerika Serikat tahun 1949-55, Jorgenson dan Griliches sebenarnya tidak menemukan "residual" yang perlu dijelaskan setelah keduanya mengadakan koreksi atas kesalahan menyeluruh pada modal, buruh, harga, dan sebagainya. Sesudah mengadakan penyesuaian terhadap kesalahan seperti itu, sumbangan residual tersebut turun sampai 0,1 persen per tahun. Kelima, kriteria residual didasarkan pada fungsi produksi yang ditandai dengan skala hasil (*returns to scale*) yang konstan. Dalam kenyataan, ekonomi maju tergantung pada skala hasil yang meningkat. Alhasil, pertumbuhan output lebih banyak disebabkan oleh kenaikan input fisik dan kurang pada kenaikan "faktor residual". Terakhir, sumbangan modal terhadap pertumbuhan ekonomi kurang diperhitungkan di dalam kriteria residual. Jika sumber-sumber yang dipergunakan untuk kemajuan pengetahuan dianggap sebagai investasi dan pengertian persediaan modal mencakup jenis investasi ini, maka laju pertumbuhan akan lebih banyak berkaitan dengan kenaikan persediaan modal dan sedikit saja yang merupakan hasil kenaikan di bidang pengetahuan, keterampilan, latihan, dan lain-lain yang masuk kategori residual. Jadi kriteria residual tidak cukup mendapatkan dukungan dari ahli – ahli ekonomi.

Jadi Kesimpulannya, Apa pun kesulitan yang terkandung dalam masalah investasi pada modal manusia, sekarang sepenuhnya diakui bahwa pertumbuhan negara terbelakang terhambat bukan oleh karena kekurangan

modal fisik belaka tetapi oleh karena kekurangan keterampilan dan pengetahuan kritis yang pada gilirannya membatasi kapasitas perekonomian menyerap persediaan modal fisik yang tersedia. Oleh karena itu pembentukan modal manusia bahkan dianggap lebih penting ketimbang pembentukan modal material.

3. *Human Capital sebagai Aset yang Terlihat (Visible Asset)*

Gaol (2014 : 697 – 698) mengemukakan bahwa sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor sentral yang strategis dibentuk untuk menjalankan berbagai kepentingan visi perusahaan. Pada lingkungan dunia dewasa ini, telah terjadi perubahan pandangan mengenai berbagai sumber daya yang bersifat strategis bagi perusahaan. Perubahan tersebut yaitu dari dominasi sumber daya yang bersifat fisik (*tangible asset*) kearah aset tak berwujud (*intangible asset*).⁸⁸

Munculnya pandangan bahwa pengetahuan sebagai sumber daya perusahaan yang sangat strategis didasari kenyataan bahwa pengetahuan dapat digunakan untuk mengembangkan daya saing perusahaan yang bernilai, langka, suka tiru oleh pesaing dan tidak tergantikan oleh jenis sumber daya lainnya. Sehingga dengan adanya pengetahuan yang dimiliki organisasi atau pengetahuan melalui tenaga manusia yang ada didalamnya maka manusia dijadikan modal yang terlihat (*Human Capital*).

Pada perkembangan dunia bisnis sekarang ini, manusia tidak hanya dijadikan sebagai salah satu sumber daya (mesin, uang, material atau bahan – bahan informasi) termasuk data dan personal, tetapi juga sebagai penggerak sumber daya lainnya. Manusia sebagai salah satu aset perusahaan yang berwujud, selain gedung, mesin, dan

⁸⁸ Gaol, CHR Jimmy L. *A to Z Human Capital* Manajemen sumber daya manusia, Jakarta : Grasindo. 2014.

uang, menjadi penggerak sumber daya lainnya, baik yang berwujud dan yang tak berwujud.

4. Keuntungan dari *Human Capital*

Menurut Setiono Winardi (2014), manfaat yang dapat ditarik dari penerapan modal manusia, dapat dibagi menjadi beberapa hal:

1. Mengurangi biaya produksi, tetapi tidak membatasi ke penciptaan nilai
2. Mendapatkan poin – poin penting dari peningkatan keuntungan yang meningkat
3. Menentukan modal manusia sebagai aset yang mempunyai nilai produksi dan bukan melakukan tindak meminimalkan biaya atau memperketat
4. Membantu menganalisa hasil utama seperti mempengaruhi produktivitas dari waktu ke waktu, serta memprediksi laba atau investasi pada manusia.
5. Mengidentifikasi dan berfokus pada apa yang penting untuk mendorong suatu nilai.⁸⁹

5. Hubungan *Human Capital Investment* dengan **Pertumbuhan Ekonomi**

Pendidikan pada diri seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan informasi dan memperoleh pemahaman akan perekonomian serta memberikan pilihan apakah seseorang ingin menjadi produsen, konsumen atau yang lain. Tenaga kerja, modal fisik dan tanah dapat mengalami *dimishing return* akan tetapi ilmu pengetahuan tidak bisa. Jadi, investasi modal manusia merupakan faktor utama dalam peningkatan faktor produksi secara total.⁹⁰ Demikian pula kesehatan seseorang sangat berpengaruh dalam aktivitas ekonomi sehari – hari. Apabila kesehatannya baik, maka

⁸⁹ Winardi Setiono. *Human Capital* sebagai Sarana Kebersihan Bisnis. 2014.

⁹⁰ Kuncoro. 2010 : 9.

berdampak positif bagi aktivitas ekonomi manusia tersebut, namun jika kesehatannya buruk maka manusia tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan optimal.

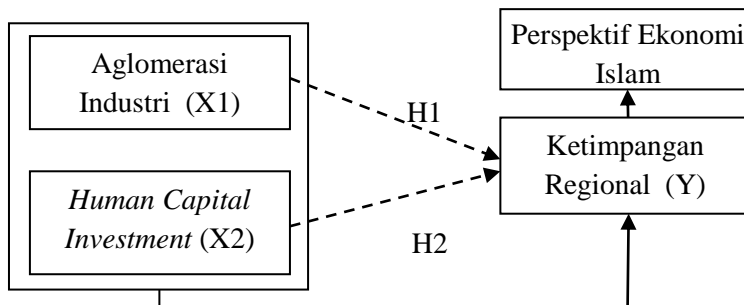
6. Hubungan *Human Capital Investment* dengan Ketimpangan

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. *Human capital* dan ketimpangan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Menurut Becker dalam Noto (2016) menyebutkan teori *human capital* bahwa manusia bukan hanya sebagai sumber daya namun modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. *Human capital* ini berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Kajian yang lebih dalam mengenai peran pendidikan formal sebagai salah satu dimensi sumber daya manusia dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dengan hasil semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja juga akan semakin tinggi. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketimpangan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsep berpikir digunakan untuk mempermudah penulis mengetahui arahan tujuan penelitiannya. Kerangka berpikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah penting.⁹¹ Adapun kerangka berpikir pada penulisan ini adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritik pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritik, peneliti perlu menjelaskan hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Jika pada penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan juga mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan pada penelitian. Oleh karena itu, setiap penyusunan paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir.

Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya mempunyai hipotesis yang berbentuk komparasi, maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis yang berbentuk hubungan maupun komparasi, perlu dikemukakan kerangka berpikir.

Kerangka konseptual ini akan berfungsi untuk memfasilitasi penelitian dilakukan serta untuk memperjelas dan menekankan akar pemikiran digunakan dalam penelitian ini. Hubungan antar variabel diatas dijelaskan bahwa Ketimpangan Regional merupakan variabel Y, dan variabel Agglomerasi Industri sebagai variabel X1, dan *Human Capital*

⁹¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dua kombinasi (*Mixed method*) Jakarta : CV Alfabeta (2013): 93.

Investment sebagai variabel X2. Didalam penelitian ini akan di uji variabel Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* yang benar adalah bagaimana pengaruh terhadap variabel Ketimpangan Regional.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat dugaan dari suatu penelitian. Dengan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris (fakta lapangan). Hipotesis dapat benar atau terbukti dan tidak terbukti setelah didukung oleh fakta – fakta dari hasil penelitian lapangan.⁹² Dengan mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis dan beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Aglomerasi Industri terhadap Ketimpangan Regional di Pulau Sumatera

Aglomerasi Industri memegang peranan yang sangat penting terhadap pembangunan di suatu kawasan. Aglomerasi Industri dapat mengurangi ketimpangan regional antar wilayah apabila persebaran industri pengolahan merata sehingga meningkatkan produktivitas dan pengoptimalan sumber daya alam serta faktor produksi. Dalam penelitian ini variabel Aglomerasi Industri dipilih karena nilai Aglomerasi yang mana merupakan pemusatan industri – industri di suatu wilayah tidak sama antar wilayah. Provinsi-provinsi tertentu memiliki peran industri yang relatif lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, artinya belum merata sampai saat ini, mengakibatkan kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang terjadi masih sangat tinggi, hal ini dipengaruhi oleh persebaran industri di pulau Sumatera yang merupakan salah satu sektor penunjang terbesar

⁹² Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi, *Alfabeta* (2019) : 63

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto masih terpusat pada beberapa wilayah tertentu saja, sedangkan pada beberapa wilayah lainnya masih sangat rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farida Rahmawati dan Refsy Ayu Yuniarti (2020) bahwa tingkat aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.⁹³ Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Anshori (2021) yang mengemukakan bahwa aglomerasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis 1 :

H_0 : Aglomerasi Industri tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional di pulau Sumatera.

H_a : Aglomerasi Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional di pulau Sumatera.

2. Pengaruh *Human Capital Investment* Terhadap Ketimpangan Regional di Pulau Sumatera

Human capital investment merupakan salah satu indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan regional dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mana menjadi modal fisik dalam perekonomian untuk lebih produktif. Pada variabel ini dipilih karena nilai dari *Human Capital Investment* antar provinsi di pulau Sumatera berbeda – beda. *Human Capital Investment* yang tidak merata berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif maju akibat dari kualitas manusianya yang lebih

⁹³ Farida Rahmawati dan Refsy Ayu Yuniarti. *Analysis Of The Effect Of Industrial Agglomeration, Economic Growth, Human Development Index (HDI), And Open Unemployment Rate On Regional Inequality In East Java Province. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and law*. Vol 22, Issue 1 (August) 2020.

baik dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hariani, E (2019) bahwa *Human Capital Investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.⁹⁴ Namun berbeda dengan penelitian Muhammad Ersad (2022) yang mengemukakan bahwa *human capital investment* tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Sumatera. Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis 2 yaitu :

H_0 : *Human Capital Investment* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Regional di pulau Sumatera.

H_a : *Human Capital Investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional di pulau Sumatera.

3. Pengaruh Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* secara bersama – sama terhadap Ketimpangan Regional Pulau Sumatera ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Ketimpangan yang terjadi antarwilayah disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing – masing wilayah, ekonomi konsentrasi kegiatan wilayah, alokasi dana pembangunan antarwilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mela Apriani Damayanti (2019), yang menemukan bahwa hasil regresi data panel secara simultan aglomerasi, investasi

⁹⁴ Hariani, E. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012 – 2015 *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 3(1), (2019) : 13 - 23.

dan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.⁹⁵ Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis 3 yaitu :

H_0 : Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* secara bersama – sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional pulau Sumatera ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

H_a : Aglomerasi Industri dan *Human Capital Investment* secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Regional pulau Sumatera ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

⁹⁵ Mela Apriani Damayanti. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Agus Eko Sujianto, “Pengantar Ilmu Ekonomi: DIKTAT” (tulungagung : STAIN, 2006).
- Armstrong, M. “*A Handbook of HRM practice. Kogan page publishers*” 2006.
- Backer, G. S. Garry S. “*Human Capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education*”. *The university of chicago press*. 1993.
- _____. “*Under Investment In College Education*”. AER. 1960.
- Badan Pusat Statistik, “Konreg PDRB – ISE (Indikator Sosial Ekonomi Se-Sumatera 2020)”.
- Baltagi BH. “*Econometric Analysis of Panel Data*”. Ed. 3, John Wiley & Sons, Ltd, *England*. 2005.
- Beik, Irfan. S., & Arsyianti, Leili D. “*Ekonomi Pembangunan Syariah*”. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Borjas, George J. “*Labor Economics (Seventh Edition)*”. New York : McGraw – Hi. 2016.
- Dr. Windhu Putra, S.E.,M.Si. “*Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia*”. Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT) Ed. 1, Cet 1, - (Depok : Rajawali Pers). 2020.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. “*Dasar – dasar Ekonometrik Edisi 5 Buku 2*”. Salemba Empat, Jakarta (2012).

- _____. “*Essentials of Econometrics* (3rd ed)”. Translated by Mulyadi, J.K.,dkk. 2007. Jakarta : Erlangga. 2006.
- Hasan, M. Iqbal. “Pokok – pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)”. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2002.
- Lincoln Arsyad. “Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima”. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2010.
- _____. “Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah”. BPFPE, Yogyakarta. 1999.
- M. L. Jhingan. “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”. Jakarta : Rajawali Pers, Ed. 1, Cet 17. 2016.
- Mudrajad kuncoro. “Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, perencanaan, Strategi, dan Peluang”. (Jakarta : Erlangga) (2004).
- _____. “Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia”. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2002).
- Muhammad Amin Suma. “Tafsir Ayat Ekonomi”. (Jakarta : AMRAH, 2015).
- Muhammad Ivan ed. “Literasi dan *Human Capital*”. (Yogyakarta : Samudra Biru,2021).
- Nurul Huda. “Ekonomi Pembangunan Islam”. Jakarta : Kencana. 2017.
- Santoso, Singgih. “Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan Ekonometrika”. (Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, (2009).

- Shihab, Quraish. “*Tafsir al – Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an*”. Vol.14, Jakarta : Lentera Hati. 2002.
- Sjafrizal. “Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia”. Perpustakaan nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ed 1, Cet 1, (Depok : Rajawali Pers). (2018): 119.
- _____. “Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia”. (RAJAWALI PERS). 2018.
- _____. “Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi”. Boduose Media. Padang, Sumatera Barat. 2008.
- _____. “Ekonomi Wilayah dan Perkotaan”. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- _____. “Ekonomi Wilayah dan Perkotaan Edisi Kedua”. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) (2014).
- Sugiyono. “Metode Penelitian Bisnis (pendektan kuantitatif, kualitatif dan R & D)”. (Bandung : Alfabeta) (2012).
- _____. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dua kombinasi (*Mixed method*)”. Jakarta : CV Alfabeta, (2013).
- _____. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi”. Alfabeta. (2019).
- Sukirno, Sadono. “Makro Ekonomi Teori Pengantar”. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- _____. “Pengantar Teori Makro Ekonomi”. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Todaro. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. (Edisi Ketujuh). Jakarta: Erlangga. 2000.

- _____. Michael P, dan Stephen C. Smith. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesebelas Jilid 1, Jakarta : Erlangga. 2011.
- _____. “Pembangunan Ekonomi di Dunia”. Edisi kesembilan, Jilid I. (Jakarta : Erlangga,2003).
- Umar, Husein. “Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa Untuk Melakukan Riset Dilengkapi contoh Proposal Dan Hasil Riset Bidang Manajemen Dan Akuntansi”. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, n.d).
- Widarjono, Agus. “Ekonometrika Edisi Kelima”. (Yogyakarta : PP STIM YKPN). 2018.
- _____. “Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi Ketiga”. Yogyakarta : Ekonesia. 2009.
- Yusuf, Qardhawi. “Norma dan Etika Ekonomi Islam”. (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).

Jurnal International :

- E. Denison. “*Education, Economic Growth and Gaps in Information*”. (JPE, Supplement), 1962.
- Farida Rahmawati dan Firtiani Romziatin. “*Do Industrial Agglomeration and Investment Shrink Regional Inequality*”. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. 8 (2), 2020.
- Farida Rahmawati dan Refsy Ayu Yuniarti. “*Analysis Of The Effect Of Industrial Agglomeration, Economic Growth, Human Development Index (HDI), And Open Unemployment Rate On Regional Inequality In East Java Province. South East Asia*”. *Journal of Contemporary Business, Economics and law*. Vol 22, Issue 1 (August 2020).

- Hariani, E. “Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012 – 2015”. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 3(1), (2019).
- Maryati Ari, Dyah Setyorini G, and suharno. “*Inequality Between The Region In The Province of Central Java 2012 – 2016*”. *International Conference on Rural Development an Entrepreneurship 2019 : Enhancing Small Business and Rural Development Toward Industrial Revolution 4.0*. vol. 5 No.1. 2019.
- Mukhlis, Bernadette R, Taufiq M, & Rosmiyati Chodijah. “*Agglomeration of Manufacturing Industrial, Economic Growth, And Interregional Inequality in South Sumatra, Indonesia*”. *International Journal of Economics and Financial Issue*, vol 7. 2017.
- Myrdal, G, & Sitohang, P. “*Economic theory and under – developed regions*”. (1957).
- Sbergami, Federica. “*Agglomeration and Economic Growth : Some Puzzles Graduate Institute of International Studies*”. Geneva. 2002.
- Siti F, Syarwani c, & Sri Indriyani S. “*Influence od Industrial Agglomeration, Labor, and Happy Levels on Economic Growth*”. *European Journal of Research Development and Sustainabillity (EJRDS)*, vol. 2, No.12, December 2021.
- Soeharjoto. “*Factors That Affect Inequality Diatribution Income In Central Jawa*”. *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research*. Vol. 3 Issue. 4. 2019.

Suhua zhang, Yasmin b, Aslam I, & Judhiana Abdul G. “*Exploring the Effect of Industrial Agglomeration on Income Inequality In China*”. *PloS ONE*. 18(6). 2023.

T.W . Schultz. “*Capital Formation by Education*”. *JPE*, Desember 1960.

W.G. Bowen. “*Economic Aspect for Education*”. 1964.

Jurnal Nasional :

Abdul Mannan. “*Hukum Ekonomi syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group). 29.

Agnesa Marytha C. “*Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri, Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020*”. Diponegoro *Journal Of Economics*, Vol. 11, No. 1. 2022.

Alsion Aria Erlangga. “*Agglomerasi Industri Dan Perekonomian Di Pulau Sumatera Tahun 2001 – 2015*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Universitas Lampung, Bandar Lampung). 2018.

Aprianto, Naerul Edwin K. “*Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14, No.2. 2016.

Arif Maulana. “*Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan*”. Vol. 19. No.1. 2019.

Atmanti, Hastrarini Dwi. “*Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan*”. *Jurnal Dinamika Pembangunan*. Vol. 2, No. 1. (2005).

- Bungaran Saragih. “Agribisnis Paradigma Baru Para Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian”. (3rd ed ; R.Pambudy, Ed.) Bogor : PT. Penerbit IPB Press.
- Candra Fajri Ananda. “Pembangunan Ekonomi Daerah : Dinamika dan Strategi Pembangunan”. (Malang : UB Press, 2017).
- Damayanti. “Analisis ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017)”.
- Dita Dea F & Wiwin P. “Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat”. Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.9, Agustus 2022.
- Eko Pambudi. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2013.
- Gaol, CHR Jimmy L. “A to Z *Human Capital* Manajemen sumber daya manusia”. Jakarta : Grasindo. 2014.
- Gracetyani O, Juliana R, & Lyndon R. “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara”. *Agrisocio ekonomi* 16, no.3. 2020.
- Hasibuan, Nurimansyah. “Ekonomi Industri : Persaingan Monopoli dan Regulasi”. Yogyakarta : LP3ES. 1993.
- Hidayat, M. H. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 – 2012”. (2014).

- Imelda, S.E., M.E. “Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah : Tinjauan Teoritis dan Empiris.” Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis”. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. (2021).
- Indah Sri Rejeki. “Peran Aglomerasi dalam Penyebaran Investasi Asing Langsung (FDI)”. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 14, ISS 1, *Article 3*. (2019).
- Ingil Intan H, Vecky A. J & Mauna Th. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 01, Juli 2021.
- Islami, Fitrah Sari, & Nugroho SBM. “Faktor – Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur Indonesia”. *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol.33 No.1. 2018.
- Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar. “Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 8, Nomor 2, (Oktober 2007).
- Kartira Dorcas Andhiani, Erfit, Adi Bhakti. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera”. *e – jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7, No. 1, Januari – April 2018.
- Luthfi Anshori. “Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, dan Investasi terhadap Ketimpangan Kabupaten /Kota di Provinsi Banten”. *Jurnal ilmiah*. Universitas Brawijaya. 2021.
- Madnasir & Liya Ermawati. “Pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Relevansinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah”. *AT – TAWASSUTH : Jurnal Ekonomi*

Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Vol. VIII, No.II. 2023.

Matitaputty, Shandy Jennifer. “Analisis Faktor Aglomerasi Industri Manufaktur Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Dengan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1994 – 2007”. (2010).

Mela Apriani Damayanti. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013 – 2017)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Muhammad Ersad, Amri Amir dan Zulgani. “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan”. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 17. No.2. (2022) : 425 – 438.

Muhammad Ridho, Zulgani & Erni A. “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Antar Provinsi di Pulau Sumatera”. e – jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah vol.11, No. 1, Januari – April 2022.

Munthe, Marabon. “Konsep Distribusi Dalam Islam”. *Jurnal Syariah*. Vol, 2, No.1. 2014.

Mustofa Edwin Nasution. “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”. (Jakarta : Kencana, 2007).

Nur Chollidah. “Analisis Konsentrasi Spasial dan Kekuatan Aglomerasi Industri Kecil Makanan Olahan di Kabupaten Semarang”. *Economics Development Analysis Journal*, (Universitas Negeri Semarang, Indonesia). 2012.

- Nurul Mahmudah, Viviana & Muhammad Syakir A. “Menakar Dampak Perempuan Bekerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga”. Institut Agama Islam Negeri Metro, SETARA (Jurnal Studi Gender dan Anak), Vol. 4, No.2, 2022.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. (2017) : 255 – 285.
- Putra, E. D., Christina, M., & Pratiwi, Y. “*Identification of Leading Sector and Cluster Analysis of Regencies in Kalimantan*”. 8(2). (2019).
- Rahmawaty, Anita. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”. Equilibrium. Vol.1, No.1. 2013.
- R.S. Eckaus. “*Economic Criterion For Education and Training*”. RES, Mei 1964.
- Sandi, I Made. “Republik Indonesia Geografi Regional”. Jakarta : Puri Margasari. 2010.
- Santi R. Siahaan. “Pengantar Ekonomi Pembangunan”. (Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2013.
- Stanny, D. “Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Barat (Analisis Input Output)”. Institut Pertanian Bogor. 2009.
- Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hedriani, Melia Famiola. “*Green Economy (Ekonomi Hijau)*”. (Bandung : Rekayasa Sains, 2014).

Uswatun Khasanah. “Pengaruh Aglomerasi, Angkatan Kerja, dan *Human Capital Investments* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Provinsi Lampung Pada Periode 2014 – 2020)”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2021.

Vincent Wijaya. “Dampak Tingkat Aglomerasi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Daerah Sumatera Bagian Selatan”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya). 2022.

Winardi Setiono. “*Human Capital* sebagai Sarana Kebersihan Bisnis”. 2014.

Wiratna Sujarweni. “Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”. (Yogyakarta : Pustaka Buana Press. 2015).

Yuli tri arimurty N, Rully N, Wurarah, dan Dedy Riantoro. “Analisis Pengaruh Aglomerasi Industri Pengolahan Terhadap Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Regional di Provinsi Papua Barat”. *Lensa Ekonomi*, Vol 11, No 01, November 2020.

Yusica, Lilng vera, Nazaruddin Malik, dan Arifin, Zaenal. “Analisis Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol 2 jilid 2, (2018).

Situs Internet Resmi :

Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/>.